



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Tasikmalaya, membawa implikasi terhadap perubahan kondisi Kabupaten Tasikmalaya baik dari aspek kewilayahan maupun aspek non kewilayahan, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan dan atau penyesuaian serta penyusunan yang baru mengenai Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2001-2005.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 Nomor 3 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 45 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB	III	KONDISI KABUPATEN TASIKMALAYA
BAB	IV	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB	V	ISU-ISU STRATEGIS
BAB	VI	STRATEGI PEMBANGUNAN
BAB	VII	KETENTUAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN RENSTRA
BAB	VIII	PENUTUP

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Sistematika Renstra Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	KONDISI UMUM
BAB	III	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB	IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB	V	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN
BAB	VII	PENUTUP

B. Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 3

- (1) isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Bagan dan atau matrik Lampiran I Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya.
Pada tanggal 13 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 27 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TANGGAL 9 OKTOBER 2003

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sejak tahun 1997 terjadi perubahan-perubahan besar yang disebut reformasi. Dalam reformasi tujuan utama adalah pengembangan masyarakat (baik institusi, proses, dan budaya) demokrasi salah satu pilar membangun masyarakat madani, dan ada tiga upaya strategis yang perlu mendapat perhatian : (1) Meningkatkan komitmen untuk meniaga persatuan dan kesatuan sebagai landasan bagi perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945/Pancasila; (2) Memperkuat kehidupan dan lembaga-lembaga demokrasi dalam rangka mewujudkan masyarakat Madani melalui terselenggaranya *Good Governance*; (3) Mewujudkan kondisi perekonomian yang memiliki ketahanan dan daya saing tinggi serta berkeadilan sosial, terutama dalam menghadapi persaingan global dan juga dalam kehidupan perekonomian lokal.

Cara pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah berdasarkan *Good Governance*. Ini berarti bahwa *governance* dari pembangunan Negara dan seluruh masyarakat bangsa ini harus dilakukan secara "*sharing*" bersama-sama sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat. Saling mengisi dan mengawasi agar terjadi keseimbangan kebijakan dan pelaksanaannya. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam proses menjalankan reformasi dan melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Tasikmalaya mengalami peristiwa yang spesifik yang tidak dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu terpecahnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi dua daerah otonom : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya resmi menjadi dua daerah otonom, dengan sendirinya membawa konsekuensi logis kepada

perubahan tatanan kehidupan pemerintahan, pelayanan masyarakat, maupun kebijakan pembangunan strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut harus diakui dan disadari Pemerintahan Kabupaten untuk dapat menerima realita yang ada dan menyikapinya dengan penuh kebijaksanaan.

Setiap terjadi perubahan yang mendasar selalu diawali oleh adanya perubahan filosofis. Perubahan-perubahan tersebut antara lain meliputi perwilayahan meliputi : luas wilayah, batas-batas wilayah, jumlah penduduk; dan non perwilayahan seperti pemerintahan, struktur perekonomian, PDRB, pendapatan perkapita, potensi daerah dan tentu saja skor IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang sampai saat ini masih menjadi tolok ukur kemajuan suatu daerah. Setiap awal perubahan dalam organisasi yang menuntut tanggungjawab, selalui dimulai dengan penyusunan dan pemilikan visi, misi dan strategi sebagai arah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi.

Berubahnya struktur perekonomian dan potensi daerah, dimana karakteristik Kabupaten Tasikmalaya saat ini lebih bernuansakan perdesaaan daripada perkotaan, dengan potensi sumber daya alam yang lebih menonjol, perlu didukung oleh kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mendorong kearah perkembangan optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk menghadapi perkembangan kehidupan yang semakin maju yang membutuhkan pengelolaan kehidupan yang mempunyai kapabilitas adaptif dan memungkinkan kelompok masyarakat melakukan positioning secara tepat agar mampu meraih keberhasilan dalam dunia yang semakin kompetitif.

1.2. Landasan Hukum

Revisi Renstra Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan Mandat atau Landasan Hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar dalam menyelenggarakan kehidupan pemerintahan kabupaten dan kota, sebagai daerah otonom dengan menekan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan kepada potensi dan kekhasan daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi acuan dalam penerimaan sumber-sumber pembiayaan daerah, melalui prinsip desentralisasi.
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dijadikan sebagai landasan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi pemerintahan.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya dan tuntutan situasi berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan Kota Tasikmalaya menjadi daerah otonom yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya dan aneka ragam masalah pemerintahan dan pembangunan yang lebih banyak menuntut tanggungjawab dan konsentrasi untk memajukan daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Nomor 4022).
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- h. Keputusan Presiden RI Nomor 67 tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 - 2005.

- j. Komitmen Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama seluruh "stakeholders" , tentang penyusunan Renstra dan pentingnya Renstra dalam menjelang dan merancang kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

1.3. Pengertian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya akan dijelaskan bagian bagian dari Renstra dan pemahaman Renstra itu sendiri.

1.3.1. Visi

Visi (vision) adalah wawasan, pandangan luas, penglihatan, impian, hayalan, atau bayangan yang mencerminkan keinginan-keinginan ke depan yang akan dicapai. Visi dapat merupakan suatu tujuan, keinginan atau harapan. Visi Kabupaten Tasikmalaya harus dapat dirasakan dan diakui sebagai milik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, demikian pula visi setiap organisasi harus merupakan hayalan atau bayangan ideal yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Dikemukakan oleh Kouzes (John M. Bryson, 1999) bahwa "*Visi memfokus kepada masa depan yang lebih baik, mendorong harapan dan impian, menarik nilai-nilai umum, menyatakan hasil yang positif, menekankan kekuatan kelompok dan merupakan rekaan metafora*".

Dalam penyusunan intervensi perubahan, rancangan kegiatan selalu berkaitan dengan visi dan misi, atau dalam kata lain hierarki perubahan berawal dari adanya perubahan visi yang dijabarkan ke dalam misi, kemudian disusun rencana strategic (strategic plan), untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja (action plan) atau program kegiatan.

Visi → Misi → Rencana Strategis → Program → Rencana Kerja

Karena visi merupakan sumber bagi aktivitas dan tujuan aktivitas, maka penyusunan visi harus memperhatikan banyak hal, diantaranya : nilai daerah yang merupakan ciri khas (culture core), pemahaman akan diri atau masyarakat, penglihatan ke masa depan, dan kondisi impian atau cita-cita.

1.3.2. Misi

Misi (mission) adalah fungsi, tugas, penugasan atau kepercayaan yang dirasakan sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini sudah barang tentu sebagai tugas yang dipercayakan rakyat kepada aparat pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan pengertian tersebut, timbul pertanyaan, rincian tugas seperti apa yang dibebankan rakyat Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu misi merupakan rincian tugas yang merupakan penjabaran dari suatu visi.

Misi adalah rumusan langkah-langkah yang merupakan kunci untuk mulai melakukan inisiatif mewujudkan, mengevaluasi dan mempertajam bentuk-bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam visi (seseorang, masyarakat, organisasi atau daerah). Karena itu misi dan visi selalu berkaitan. Misi merupakan penjabaran dari visi atau untuk mewujudkan visi harus disusun misi.

1.3.3. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dan pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang isinya merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis (strategic plan), lokal, nasional dan global.

Rencana strategis (strategic plan) adalah kumpulan konsep, prosedur, dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu para pemimpin dan manajer dalam tugas-tugasnya (John, M. Bryson, 1999) Perencanaan Strategis dapat didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu, bagaimana suatu organisasi pemerintah, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal itu.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai (Inpres Nomor 7, 1999).

Langkah-langkah penyusunan rencana strategis (Depdagri Otda & Bappenas, 2000), meliputi : (1) kesepakatan awal, (2) perumusan mandat, (3) analisis kondisi internal, (4) analisis kondisi eksternal, (5) Perumusan visi, (6) perumusan misi, (7), penentuan isu-isu strategis, (8) penentuan bidang strategis, dan (9) perumusan strategi.

Model rencana strategis (strategic planning) dari Whittaker (dalam Lembaga Administrasi Negara & BPKP, 2000: 3) meliputi : misi, visi, nilai, analisis internal, analisis eksternal, asumsi, analisis strategis, faktor kunci keberhasilan, (critical success factor), tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan rencana, (establish accountability implement plan).

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait, akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.

Suatu organisasi instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti, indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan operasional yang terukur, maka dapat diharapkan

tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu pemerintah daerah dengan berbagai komponen organisasinya, harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Perubahan yang dapat dilakukan antara lain mencakup reengineering, restructuring, quality program, mergers and acquisition, strategic change, dan cultural change. Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, setiap organisasi perlu menyusun perencanaan strategis.

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal, dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional, dan prioritas-prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari organisasi membentuk suatu Rencana Induk (Master Plan) yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi tersebut memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*).

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana strategis berbeda dengan rencana komprehensif dan rencana induk atau jangka panjang (*long-range planning*). Renstra lebih bersifat untuk menjawab aneka ragam tuntutan masyarakat dan merupakan solusi dari masalah-masalah yang bersifat mendesak. Renstra lebih menitikberatkan kepada pemecahan isu-isu strategis, berbeda dengan rencana jangka panjang yang bersifat “*linier*” dan lebih memfokuskan pada sasaran (*objectives*) dan tujuan (*goals*).

Rencana strategis merupakan cara berpikir strategis untuk melakukan tindakan organisasi yang strategis dalam menghadapi masalah yang relatif kompleks melalui aneka ragam kegiatan yang dianggap memiliki akibat ganda (*multiplier effect*). Melalui analisis "swot" terhadap isu-isu strategis diharapkan dapat ditemukan bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan yang memiliki jalur kritis (*critical part*).

Renstra akan memberikan arah dan prioritas pada pembangunan lima tahun Kabupaten Tasikmalaya. Renstra tidak terikat kepada kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam bentuk organisasi pemerintahan yang ada, tetapi lebih melihat kepada desakan masalah yang harus segera ditangani secara sistematis. Renstra bertujuan mewujudkan visi dan mengemban misi dengan melakukan intervensi strategis pada bidang-bidang yang dianggap strategis dengan prinsip "*sedikit tapi penting*".

Pengembangan strategi dan implementasinya yang efektif adalah penting untuk kelangsungan organisasi. Pimpinan organisasi harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai untuk organisasinya dan sesuai dengan waktunya.

Analisis SWOT adalah alat untuk memformulasikan strategi dengan cara melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi organisasi pemerintah daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan sebagai upaya memfokuskan seluruh dimensi kebijakan pada semua bidang kewenangan pemerintah daerah. Rencana Strategis ini merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta pelayanan pada masyarakat.

Tujuan Rencana Strategis adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang dipandang baik dalam kehidupan keagamaan, sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat.

1.5. Pendekatan dan Tahapan Penyusunan Renstra

1.5.1. Pendekatan

Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu : (1) Pendekatan lingkungan strategis regional, nasional, dan internasional, (2) Pendekatan partisipasi publik dan transparansi pembangunan, (3) Pendekatan proses, dan (4) Pendekatan hasil.

1.5.1.1. Pendekatan Lingkungan Strategis Regional, Nasional, dan Internasional

Pendekatan ini akan mengarahkan seluruh stakeholders untuk mengenali lebih dalam kondisi eksisting Kabupaten Tasikmalaya pasca pembentukan Kota Tasikmalaya baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang melingkupi perwilayahan Kabupaten Tasikmalaya pada lingkungan regional terhadap daerah-daerah disekitarnya, nasional, dan internasional.

Selain itu pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan pengetahuan yang antisipatif guna mencapai kesesuaian renstra dengan perkembangan lingkungan sehingga memberikan pemahaman batasan kendali akan kendala yang dihadapi pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan tumbuh saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah daerah serta keselarasan rencana strategis dengan faktor lingkungan 10 tahun ke depan.

Sebagai bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari satu kesatuan dengan wilayah lainnya di Propinsi Jawa Barat. Dalam pendekatan lingkungan regional Jawa Barat, Renstra Kabupaten Tasikmalaya selain berusaha menyerap berbagai aspirasi masyarakat, juga berpedoman pada pengembangan Kawasan Andalan Jawa Barat, 10 Kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat dengan Bupati/Walikota se Jawa Barat, dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Dikaitkan dengan orientasi Daerah Propinsi Jawa Barat yang memfokuskan pada pengembangan Industri Manufaktur yang berbasis Agribisnis. Hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat berorientasi pada pengembangan Agribisnis. Dengan demikian Kabupaten Tasikmalaya juga berusaha mengambil peranan dalam lingkaran pengembangan Agribisnis.

Demikian pula dalam pembangunan sumberdaya manusia yang lebih berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

Dalam tataran Nasional, Otonomi Daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) *Rule of Law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu; (3) *Transparency*, informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya; (4) *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders; (5) *Consensus Orientation*, menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik; (6) *Equity*, semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka; (7) *Effectiveness and efficiency*, sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan sumber-sumber yang tersedia; (8) *Accountability*, bertanggungjawab kepada publik; dan (9) *Strategic Vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance*.

Dengan lebih terintegrasinya masing-masing Negara dengan ekonomi global, maka akan meningkatkan interdependensi antar negara.

Pendekatan lingkungan Internasional yang kuat adalah globalisasi ekonomi, suatu kecenderungan ekonomi. Ekonomi masing-masing negara dikaitkan dengan pasar regional yang lebih luas dan bahkan pasar global (*outward looking economies*). Perkembangan globalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan lain-lain harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip mutual benefit, mutual respect dan shared responsibility. Dengan memacu keunggulan komparatif dan kompetitif melalui peningkatan efisiensi ekonomi maupun kemajuan teknologi; Indonesia, dimana Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayahnya, yang merupakan salah satu negara dalam tatanan dunia internasional, akan terlibat dalam global trading system tersebut. Dan ini perlu dijadikan peluang untuk maju dengan memanfaatkan akses pasar.

1.5.1.2. Pendekatan Partisipasi Publik dan Transparansi Pembangunan

Pendekatan partisipasi publik dan transparansi pembangunan dimaksudkan untuk menyerap sebanyak mungkin aspirasi yang berkembang di masyarakat

Kabupaten Tasikmalaya : keinginan, harapan, dan impian-impian terhadap kondisi dan nilai-nilai daerah Kabupaten Tasikmalaya dimasa yang akan datang. Keinginan keinginan tersebut dituangkan pada rencana strategis yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.

1.5.1.3. Pendekatan Proses

Pendekatan proses penyusunan renstra diawali melalui tahapan literature yang dimaksudkan untuk mencari landasan ilmiah bagi penyusunan Rencana Strategis, agar perencanaan yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah baku perencanaan. Pendekatan proses dimaksudkan bahwa proses pembangunan yang dijalani akan memiliki akuntabilitas publik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, sehingga arah pembangunan tetap dalam koridor yang benar dan terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.

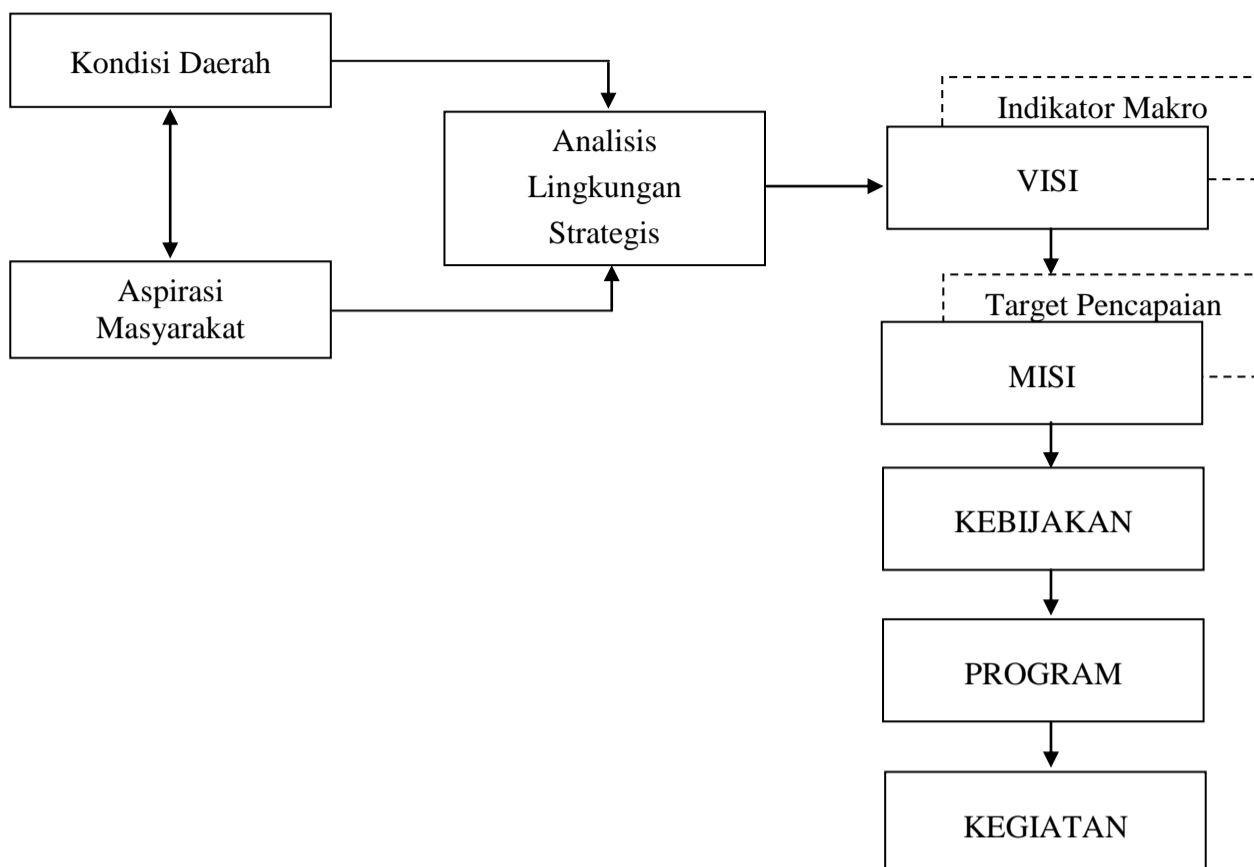
1.5.1.4. Pendekatan Hasil

Pendekatan hasil, diarahkan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil atau target-target pencapaian diterapkan pada tahapan proses pencapaian Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu target pencapaian program, strategi, misi, dan visi.

1.5.2. Tahapan Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan melalui tahapan : (1) Pengenalan Kondisi Daerah, (2) Penjaringan Aspirasi Masyarakat, (3) Analisis Lingkungan Strategis, (4) Formulasi Visi dan Misi, dan (5) Penyusunan Strategi yaitu Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Tahapan penyusunan Renstra digambarkan pada Gambar 1.1



1.6. Ruang Lingkup

Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KONDISI UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB III. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN RENSTRA

BAB VII. PENUTUP

II. KONDISI UMUM

2.1. Kondisi Perwilayahan dan Administrasi

2.1.1. Kondisi Perwilayahan

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara geografis berada di sebelah tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kab. Majalengka/Ciamis/Kota Tasikmalaya
- Sebelah Barat : Kab. Garut
- Sebelah Timur : Kab. Ciamis
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Secara geografis terletak antara $107^{\circ} 56'$ BT - $108^{\circ} 8'$ BT dan $7^{\circ} 10'$ LS - $7^{\circ} 49'$ LS dengan jarak membentang Utara Selatan terjauh 75 Km dan arah Barat Timur 56,25 Km. Luas keseluruhan sebesar 2.563,35 Km².

Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian antara 0 - 1.500 m diatas permukaan laut yang membentang dari arah utara dan yang terendah kearah selatan. Sebagian kecil wilayahnya yaitu 0,81 % berada pada ketinggian diatas 1.500 m, keadaan iklim umumnya bersifat tropis dan beriklim sedang dengan rata-rata suhu di dataran rendah antara 20° - 34° C dan di dataran tinggi berkisar 18° - 22° C. Curah hujan rata-rata 2 072 mm/tahun, jumlah hari hujan rata-rata 82 hari.

Penggunaan lahan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- Kebun : 42,45 %
- Sawah : 18,30 %
- Perumahan : 16,18 %
- Hutan : 13,52 %
- Ladang : 8,29 %
- Danau : 1,26 %

2.1.2. Wilayah Administrasi dan Pemerintahan

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari : 39 kecamatan dan 348 desa (Tabel 2.1)

Tabel 2.1.
Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa (Buah)
1	Cipatujah	242,65	14
2	Karangnunggal	136,10	14
3	Cikalong	136,96	13
4	Pancatengah	199,05	11
5	Cikatomas	132,63	9
6	Cibalong	58,35	6
7	Parungponteng	47,23	8
8	Bantarkalong	59,63	8
9	Bojongasih	35,09	5
10	Culamega	58,04	5
11	Bojonggambir	148,36	10
12	Sodonghilir	97,11	12
13	Taraju	55,53	9
14	Salawu	50,47	12
15	Puspahiang	33,19	8
16	Tanjungjaya	36,37	7
17	Sukaraja	43,14	8
18	Salopa	120,78	9
19	Jatiwaras	77,39	10
20	Cineam	77,69	10
21	Karangjaya	47,85	4
22	Manonjaya	39,49	12
23	Gunungtanjung	32,31	7
24	Singaparna	18,82	10
25	Mangunreja	26,65	6
26	Sukarame	15,58	6
27	Cigalontang	119,13	16
28	Leuwisari	44,60	7
29	Padakembang	30,15	5
30	Sariwangi	40,85	8
31	Sukaratu	33,41	8
32	Cisayong	48,33	13
33	Sukahening	23,80	7
34	Rajapolah	15,38	8
35	Jamanis	14,99	8
36	Ciawi	42,23	11
37	Kadipaten	43,26	6
38	Pagerageung	63,37	10
39	Sukaresik	17,39	8
	Jumlah	2.563,35	348

2.2. Kondisi Sosio Demografis

2.2.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebesar 1.587.078 jiwa, laju pertumbuhan mencapai 1,35 %, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 2.853.939,00. Dari sekitar 1,58 Juta jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya, Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 711.811 jiwa dan jumlah pengangguran terbuka sebesar 34.881 jiwa. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu sebesar 41,13 % dari angkatan kerja di Tasikmalaya.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 61,83.

2.2.2. Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001 sebesar 5,69 %. Tingkat pengangguran terbuka perempuan 7,30 % lebih besar dari tingkat pengangguran terbuka laki-laki yaitu 5,02 %. Sedangkan tingkat partisipasi kerja laki-laki mencapai 71,49 % lebih besar daripada tingkat partisipasi kerja perempuan yaitu 29,02 %.

Struktur ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Tasikmalaya yaitu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 41,13 %, kemudian di sektor perdagangan 20,15 %, sedangkan di sektor industri 19,09 %, dan sektor-sektor lainnya masih dibawah 10 %.

Tabel 2.2.
Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001

Jenis Kelamin	Kegiatan Utama							Jumlah
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan kerja				
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah	Sekolah	Mengurus RMT	Lainnya	Jumlah	
Laki-Laki	427.059	22.590	449.649	86.202	23.611	69.524	179.337	628.986
Perempuan	170.866	13.455	184.321	97.745	346.006	7.162	450.913	635.234
Total	597.925	36.045	633.970	183.617	369.617	76.686	630.250	1.264.220
Pengangguran Terbuka (%)								
Laki-Laki	5,02							
Perempuan	7,30							
Total	5,69							
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK - %)								
Laki-Laki	71,49							
Perempuan	29,02							
Total	50,15							

Sumber : SUSEDA 2001 (diolah)

Tabel 2.3.
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001

No.	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Pertanian	175.234	70.711	245.954	41,13
2.	Pertambangan & Usaha	2.407	0	2.407	0,40
3.	Industri	64.952	49.217	114.169	19,09
4.	Listrik, Gas & Penggalian	617	0	617	0,11
5.	Konstruksi	14.598	0	14.598	2,44
6.	Perdagangan	90.705	29.775	120.480	20,15
7.	Angkutan dan Komunikasi	38.422	617	39.039	6,53
8.	Keuangan	1.851	0	1.851	0,31
9.	Jasa	38.270	20.544	58.814	9,84
	Jumlah	427.056	170.864	597.920	100

Sumber : SUSEDA 2001 (diolah)

2.2.3. Pendidikan

Jumlah sekolah dan jumlah siswa pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Jumlah Sekolah dan Siswa Tahun 2002

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	1	121	122	157	4.008	4.165
2	SD	1.089	1	1.090	176.719	76	176.795
3	SLB	0	8	8	0	249	249
4	SLTP	65	27	92	32.161	4.878	37.039
5	SMU	8	16	24	5.127	3.969	9.096
6	SMK	0	8	8	0	1.706	1.706
	Jumlah	1.163	181	1.344	214.164	14.886	229.050

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Jumlah putus sekolah siswa SD ke SLTP sebesar 9.859 siswa dari 20.868 dan putus sekolah dari SLTP ke SLTA sebesar 10.311 siswa.

Di Kabupaten Tasikmalaya juga terdapat Perguruan Tinggi yaitu : Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Singaparna dan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya.

2.2.4. Keagamaan

Kabupaten Tasikmalaya dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang religius, hal ini dapat dilihat banyaknya jumlah pesantren yang terdapat di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 491 buah dengan jumlah santri mencapai 891.490 orang terdiri dari santri laki-laki (santriwan) 470.064 orang dan santri perempuan (santriwati) 421.426 orang pada berbagai jenjang pendidikan, mesjid 3.282 buah, dan gereja 3 buah.

2.2.5. Pemerintahan

2.2.5.1. Eksekutif

a. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 3 Badan, 13 Dinas, 9 Kantor, dan 39 Kecamatan.

- 1) Badan
 - a) Perencanaan Daerah
 - b) Pengawasan Daerah
 - c) Kepegawaian Daerah

- 2) Dinas
 - a) Pendidikan dan Kebudayaan
 - b) Pendapatan
 - c) Kesehatan
 - d) Perhubungan
 - e) Pertanahan
 - f) Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - g) Kehutanan dan Perkebunan
 - h) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - i) Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
 - j) Perindustrian dan Perdagangan
 - k) Pekerjaan Umum
 - l) Koperasi dan UKM
 - m) Permukiman dan Tata Kota

- 3) Kantor
 - a) Pemberdayaan Masyarakat
 - b) Arsip Daerah
 - c) Polisi Pamong Praja dan PPNS
 - d) Perlindungan Sosial dan Linmas
 - e) Pariwisata
 - f) Kesatuan Bangsa dan Humas
 - g) Pelayanan Perijinan Satu Atap
 - h) Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - i) Pengelolaan Pasar

b. Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil 14.821 orang. Menurut golongan terdiri dari : Golongan IV 927 orang, Golongan III 9.398 orang, Golongan II 4.006 Orang, dan Golongan I 490 orang. Sedangkan menurut pendidikan terdiri dari : SD 393 orang, SLTP 786 Orang, SLTA 9.921 orang, Sarjana Muda 1.343 orang, S1 2.307 orang, dan S2 71 orang. Tenaga-tenaga fungsional yang dimiliki

antara lain : Guru 9.854 orang, Pengawas 69 orang, Dokter Umum / Gigi 14 orang, Perawat 491 orang, Perawat Gigi 64 orang, Sanitaria 34 orang, Nutrisi / Gizi 19 orang, farasi 10 orang, Analisa / lab 8 orang, Epidemiologi 2 orang, Pembantu paramedis 81 orang, Pengawas Bibir 8 orang, Penyuluh Pertanian 203 orang, Penyuluh Kehutanan 29 orang, Arsiparis 10 orang, dan Pustakawan 15 orang.

2.2.5.2. Legislatif

Berdasarkan hasil Pemilu 1999, tersusun komposisi keanggotaan DPRD terdiri dari : PPP 11 orang, Partai Golkar 9 orang, PDIP 8 orang, PAN 3, PKP 1 orang, PK 1 orang, PBB 2, PKB 5 orang dan anggota yang diangkat dari TNI-POLRI sebanyak 5 orang.

Sedangkan perangkat DPRD memiliki 5 Komisi yaitu Komisi A Bidang Pemerintahan dan Keamanan, Komisi B Bidang Perekonomian, Komisi C Bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah, Komisi D Bidang Pembangunan, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2.3. Kondisi Infrastruktur Dasar

2.3.1. Prasarana Jalan

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki jaringan jalan sepanjang 1.051.890 km dengan kondisi baik sepanjang 101.950 km (9,69 %), kondisi sedang 164.200 km (15,61 %), kondisi rusak 383.390 km (36,45 %), dan rusak berat 402.350 km (38,25 %).

Fasilitas lalu lintas yang dimiliki antara lain : rambu-rambu lalu lintas 180 buah, rambu pendahulu petunjuk jurusan 18 buah, penerangan jalan umum 623 buah, warning light 9 buah, gurdril 5.000 m, dan marka jalan 4.200 m². Rata-rata dalam kondisi baik.

2.3.2. Sumber Daya Air dan Irigasi

Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber-sumber mata air yang melingkupi 452,52 ha kawasan mata air, kawasan dengan radius 200 m disekitar mata air, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air (Tabel 2.5.).

Tabel 2.5.
Mata Air dan Kawasan Sekitar Mata Air

No.	Nama Mata Air	Kawasan Sekitar Mata Air		
		Desa	Kecamatan	Luas (ha)
1	Cibunigeulis	Cibunigeulis	Sukaratu	12,57
2	Cipirit	Sukamulih	Leuwisari	12,57
3	Manggung	Linggamulya	Leuwisari	12,57
4	Cipondok	Jayaraty	Leuwisari	12,57
5	Jambuarang	Parungponteng	Cibalong	12,57
6	Cikapinis	Burujuljaya	Cibalong	12,57
7	Cihonje	Parungponteng	Cibalong	12,57
8	Cibuntu	Cigunung	Cibalong	12,57
9	Kiangronyoh	Puspahiang	Salawu	12,57
10	Cireuma	Puspahiang	Salawu	12,57
11	Bulakan	Cimanggu	Salawu	12,57
12	Cikalutak	Cukangkawung	Sodonghilir	12,57
13	Cidalum	Cikalong	Sodonghilir	12,57
14	Cisoledat	Cikalong	Sodonghilir	12,57
15	Cibarengkok	Cikalong	Sodonghilir	12,57
16	Cimanggu	Cikalong	Sodonghilir	12,57
17	Cibangbay	Urug	Kawalu	12,57
18	Cianjur II	Picungremuk	Kawalu	12,57
19	Ciucit	Buniasih	Pancatengah	12,57
20	Cisoka	Buniasih	Pancatengah	12,57
21	Palahang	Pangliaran	Pancatengah	12,57
22	Cirangra	Cirangra	Cikalong	12,57
23	Nyolonong	Kalapagenep	Cikalong	12,57
24	Cigede	Cikadu	Cikalong	12,57
25	Tahur	Cikadu	Cikalong	12,57
26	Galumpit	Darawati	Cipatujah	12,57
27	Cirangkong	Cikukulu	Karangnunggal	12,57
28	Gunung Payung	Cikukulu	Karangnunggal	12,57
29	Cikulahar	Cidadap	Karangnunggal	12,57
30	Karangmekar	Karangmekar	Karangnunggal	12,57
31	Parakanhonje	Parakanhonje	Bantarkalong	12,57
32	Setok	Sukamaju	Bantarkalong	12,57
33	Jatihurip	Jatihurip	Cisayong	12,57
34	Cibalandongan	Kudadepa	Cisayong	12,57
35	Cikelap	Sukadana	Pagerageung	12,57
36	Sukaresik	Sukaresik	Pagerageung	12,57
				452,52

Jaringan irigasi di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari irigasi teknis PU dan irigasi perdesaan. Jaringan irigasi PU meliputi : Bendung sebanyak 30 buah (9 buah dalam kondisi rusak ringan), Pengambilan Bebas 2 buah, Bangunan Air 3.350 buah (668 buah rusak ringan, dan 458 buah rusak berat), Saluran Pembawa 355.902 m (sepanjang 36.027 m rusak ringan, dan 25.803 m rusak berat), Saluran Pembuang 39.183 m (sepanjang 7.836 rusak ringan dan 5.877 rusak berat). Sedangkan jaringan irigasi perdesaan terdiri dari : Bendung 102 buah (10 buah

rusak ringan), Pengambilan Bebas 32 buah (8 buah rusak ringan dan 3 buah rusak berat), Bangunan Air 498 buah (99 buah rusak ringan dan 58 buah rusak berat), Saluran Pembawa 228.828 m (45.766 m rusak ringan dan 22.410 rusak berat).

2.4. Potensi Daerah

2.4.1. Potensi Pertanian dan Pariwisata

Luas lahan baku pertanian Kabupaten Tasikmalaya sebesar 153.990 ha terdiri dari lahan sawah 49.656 ha dan lahan kering 104.334 ha.

2.4.1.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lahan sawah seluas 49.656 ha terdiri dari sawah dengan irigasi 12.252 ha, irigasi desa 25.555, dan sawah tadah hujan 11.849 ha. Komoditas yang dapat ditanam yaitu padi dan palawija yang terdiri dari komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar; serta buah-buahan dan sayuran. Terutama komoditas manggis yang menjadi unggulan, dibudidayakan di kecamatan Puspahiang, Salawu, Sukaraja, Salopa, dan Cibalong. Potensi lahan sebesar 10.750 ha baru dapat dimanfaatkan 1.411 ha (13 %), sehingga terdapat peluang pengembangan sebesar 8.952 ha. Produksi tahun 2002 sebesar 5.178 ton, sekitar 45 % sudah diekspor dengan Negara tujuan Korea, Malaysia, Saudi Arabia dll. Kecamatan Puspahiang, sebagai sentra penghasil dan pemasaran Manggis, memiliki potensi lahan seluas 816 ha, sedangkan yang termanfaatkan baru sekitar 400 ha (50 %). Sementara untuk produksi padi terdapat surplus sebesar 141.109,49 ton beras dari kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Potensi pertanian didukung oleh potensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang pertanian berupa : 1.824 Kelompok Tani, 103 Gapoktan, 33 Koperasi Tani, 123 Kelompok Wanita Tani, 224 P3A Mitra Cai, dan 34 KUD.

2.4.1.2. Perkebunan

Luas areal perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya seluas 67,991,76 ha meliputi perkebunan rakyat 62.775 ha, perkebunan besar swasta 3.032,21 ha, dan perkebunan besar Negara 2.184,55 ha. Komoditas yang dikembangkan yaitu : kelapa, teh, aren, mendong, pandan, rinu, cengkeh, kapul, kopi, dan lada. Sumberdaya manusia dan kelembagaan pendukung potensi perkebunan antara

lain : 730 kelompok tani, 8 buah koperasi, 17 pengusaha perkebunan, 1 unit pengolah minyak nilam, 27 uni pengolah teh hijau, 4 unit pengolah teh hitam, dan 13 unit pengolah karet.

2.4.1.3. Peternakan

Jenis ternak yang dikembangkan antara lain : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam, dan itik.; dan Luas tanah pengangonan 8.434,52 ha. Terutama ternak sapi potong yang dikembangkan di wilayah selatan. Potensi peternakan didukung 172 kelompok tani peternakan yang terdiri dari : 124 kelompok tani ternak pemula, 44 kelompok tani ternak lanjut, dan 4 kelompok tani ternak madya.

2.4.1.4. Perikanan dan Kelautan

Kawasan pantai membentang sepanjang 52,5 km di wilayah selatan meliputi 3 kecamatan (Cipatujah, Karangnunggal, dan Cikalong). Luas rawa 30 ha, dengan jumlah nelayan 1.415 orang, armada kapal 71 unit motor tempel, 128 Kelompok Tani Ikan Pemula, 42 Kelompok Tani Ikan Lanjut, 7 Kelompok Tani Ikan Madya, dan 2 Kelompok Tani Ikan Utama.

Potensi Sumberdaya perikanan dan kelautan dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Tabel 2.7.

Tabel 2.6.
Potensi Cabang Usaha dan SDM Perikanan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Cabang Usaha/SDM	Potensi	Realisasi	%
1	Penangkapan Laut (ton) : Jalur I, II, III ZEE	6.640	259,7	3,91
		5.770	0	-
2	Budidaya (ha) :			
	Tambak	200	12	6
	Tambak Biocrete	1.500	0	0
	Kolam	5.000	4.468,56 (pembesaran) 344,65 (pembenihan)	89,37 6,89
	Ikan Sawah	12.863	8.681	67,49
	Kolam Arus Deras (unit)	69	29	42,03
	Jaring Apung (unit)	60	20	33,33

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan, dan kelautan Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 2.7.
Potensi SDM Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Cabang Usaha	Jumlah RTP (Orang)
1	Petani Ikan (orang)	
	- Kolam	68.550
	- Sawah	26.306
	- Kolam Air Deras	29
	- Perairan Umum	8.140
	- Tambak	12
2	Nelayan (orang)	120
3	Pengusaha Ikan (orang) :	
	- Pedagang Ikan	2.700
	- Bandar Ikan Air Tawar	15
	- Bakul Ikan	18

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan, dan kelautan Kabupaten Tasikmalaya.

2.4.1.5. Kehutanan

Luas hutan Negara sebesar 43.863,82 ha, terdiri dari hutan produksi seluas 39.120,30 ha dan hutan lindung seluas 4.743,52 ha. Areal hutan produksi dibagi menjadi 3 kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan jati seluas 14.039,28 ha, kelas perusahaan pinus seluas 17.540,99 ha, dan kelas perusahaan mahoni seluas 7.540,03 ha. Luas hutan rakyat sebesar 23.626,21 ha dengan komoditi sengon, mahoni, dan bamboo.

Terdapat 6 Sub Daerah Aliran Sungai : Sub DAS Citanduy Hulu 742,52 ha, Sub DAS Ciseel 7.258 ha, Sub DAS Ciwulan Hulu 16.172,38, Sub DAS Ciwulan Hilir 2.005 ha, Sub DAS Cilangla 181,01 ha, Sub DAS Cimedang 2.667,78 ha. Luas lahan kritis seluas 10.740 ha.

2.4.1.6. Pariwisata

Potensi-potensi obyek wisata di Kabupaten Tasikmalaya antara lain : Cipanas dan Wanawisata Gunung Galunggung, Lokasi khas Wisata Budaya Kampung Naga, Wisata Ziarah Pamijahan, dan keindahan kawasan pantai selatan.

Tabel 2.8.
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Obyek Wisata di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Objek Daerah Tujuan Wisata	Tahun 2001			Tahun 2002		
		Manca Negara	Nusantara	Jumlah	Manca Negara	Nusantara	Jumlah
1	Cipanas Galunggung	275	87.955	88.230	183	100.937	101.120
2	LK Neglasari / Kp Naga	715	7.875	8.590	2.540	7.438	10.028
3	LK Pamijahan	-	207.861	207.861	-	254.224	254.224
4	Sindangkerta	120	11.564	11.684	154	11.418	11.572
5	Karangtawulan	180	10.654	10.834	212	7.699	7.911
6	Cipatujah	120	13.433	13.533	142	10.866	11.008
7	Wanawisata Galunggung	275	77.799	78.074	43	90.471	90.514
	Jumlah	1.685	417.141	418.826	3.274	483.103	486.377

Sumber : Kantor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya

2.4.2. Potensi Pertambangan

Kabupaten Tasikmalaya dikenal memiliki potensi Bahan tambang yang belum digali dengan secara optimal, antara lain : Gypsum, Pasir, Zeolit, Feldspar, Andesit, Bentonit, Tanah Liat, batu Kapur, dan Kaolin. Sebagian besar di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.9.
Komoditi Mineral Logam

No	Jenis Bahan Galian/Mineral	Lokasi Bahan Galian	Keterangan
1.	Emas	- Mineralisasi logam emas dan logam dasar terdapat di jalur pegunungan selatan Tasikmalaya (Cineam, Salopa, Cikatomas, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Taraju, Bojonggambir dan Salawu)	- Baru dilaksanakan para penambang rakyat skala kecil (SIPR), ditambang pada kedalaman max. 30 m. (sedang dieksploitasi) oleh 3 pemilik SIPR berlokasi di blok Kec.Cineam dan Kec. Mekarjaya. - Hasil analisis 2 contoh bijih di daerah mineralisasi Cibuniasih (Cikatomas-Pancatengah) diperoleh kadar Au sebesar 706.500 ppb dan 2.173.900 ppb.
2.	Pasir Besi	- Cipatujah dan Cikalong	- Merupakan Konsesi PT. Aneka tambang - Cadangan terindikasi sebesar 4.214.392,40
3.	Besi bertitan	- Di Baratdaya Bantarkalong - Cikalong	- Cadangan belum diketahui - Cikalong, cadangan terindikasi 2.357.390 ton
4.	Mangan	- Karangnunggal - Cipatujah, Cikatomas, Bantarkalong, Cibalong	- Cadangan 2 juta ton - Cadangan belum diketahui
5.	Emas, tembaga, timbal, seng, perak	- Berlokasi di Cikondang (Cineam), Nangelasari (Cipatujah)	- Cadangan belum diketahui
6.	Tembaga	Blok Pasir. Nangela, Nangelasari, Cipatujah	Daerah Pasar Nangela, Nangelasari, Cipatujah

Keterangan : Sumber data Dit. Sumberdaya Mineral, Bandung

Tabel 2.10.
Komoditi Mineral Non Logam

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi Bahan Galian	Keterangan
1.	Perlit	Karangnunggal	Cadangan belum diketahui
2.	Kaolin	Karaha, Kadipaten Padawaras, Karangnunggal	Cadangan 1.025.400 ton telah diusahakan oleh PT. UNIKA Cadangan belum diketahui
3.	Oniks	Cikarakas, Cigunung	Cadangan belum diketahui
4.	Belerang	Kawah Karaha dan Gunung Galunggung	Cadangan 29.675 ton (tipe sublimasi 20.000 ton, tipe endapan lumpur 9.675 ton)
5.	Bentonit	Karangnunggal Manonjaya	Cadangan tereka 6 juta ton telah diusahakan Cadangan belum diketahui
6.	Dolomit	Cibalong	Cadangan belum diketahui pasti
7.	Barit	Pancatengah dan Cineam	Cadangan belum diketahui (6 Ha di daerah Cineam dan selebihnya di daerah Pancatengah), pernah diusahakan
8.	Zeolit	Karangnunggal, Cipatujah, Cikalong	Cadangan tereka 39.435.125 ton
9.	Gypsum	Karangnunggal	Cadangan belum diketahui

10.	Kayu terkersikan	Cipatujah	Cadangan belum diketahui
11.	Batugamping	Sukaraja, Taraju, Sodonghilir, Salopa-Cikatomas	Cadangan ratusan juta ton
12.	Marmer	Cigunung, Karangnunggal	Cadangan jutaan ton (di daerah Cigunung luas sebaran 50 Ha belum termasuk di daerah Karangnunggal)
13.	Kalsit	Cigunung	Cadangan belum diketahui
14.	Kalsedon dan Agat	Cikarakas, Cigunung, Pancatengah, Cipatujah	Tersebar dengan cadangan cukup banyak (di daerah Cikarakas, Cigunung cadangan tereka 250.000 m ³)
15.	Fosfat	Sukaraja dan Deudeul, Taraju	Cadangan belum diketahui
16.	Feldspar	Karangnunggal	Cadangan belum diketahui
17.	Pasir	Sekitar Kawasan sayap Gunung Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan ratusan juta ton
18.	Andesit	Sekitar Kawasan sayap Gunung Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan puluhan juta m ³ (tersebar)
19.	Sirtu	Sekitar Kawasan sayap Gunung Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan jutaan m ³ (tersebar)
20.	Tanah liat	Tersebar di Karangnunggal, Bantarkalong, Cipatujah, Sukaraja, Cibeureum, Cisayong, Pagerageung	Cadangan jutaan ton. Tanah liat di daerah Cipatujah, Bantarkalong sangat baik untuk bahan baku keramik

Keterangan : Sumber data Dit. Sumberdaya Mineral, Bandung

2.4.3. Potensi Perekonomian

2.4.3.1. Industri dan Perdagangan

Kabupaten Tasikmalaya terkenal dengan industri kecil kerajinan seperti : bordir, anyaman, meubel kayu, sutera alam. Secara keseluruhan jumlah sentra industri sebanyak 249, unit usaha 9.126, menyerap tenaga kerja sebanyak 79.099 orang, dengan nilai investasi sebesar Rp 46 Milyar, yang terdiri dari industri kecil non formal, industri kecil formal, dan industri menengah. (Tabel 2.11.).

Tabel 2.11.
Potensi Industri Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Tahun 2002
1.	Sentra	249
2.	Unit Usaha	9.126
3.	Tenaga Kerja	79.099
4.	Nilai Investasi	Rp. 46.399.164.000,-
	Terdiri dari :	
	a. Industri Kecil Non Formal	
	- Sentra	249
	- Unit Usaha	8.211
	- Tenaga Kerja	67.834
	- Nilai Investasi	Rp. 29.971.025.000,-

	b. Industri Kecil Formal	
	- Unit Usaha	912
	- Tenaga Kerja	10.986
	- Nilai Investasi	Rp. 7.086.540.000,-
	c. Industri Menengah	
	- Unit Usaha	3
- Tenaga Kerja	279	
- Nilai Investasi	Rp. 9.341.599.000,-	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 2.12.
Beberapa Komoditi Industri Kerajinan

No	Komoditi	Jumlah Sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga kerja	Jumlah investasi (Rp. 000)	Jumlah Produksi (Rp. 000)
1	Bordir	26	1.043	12.135	12.409.653	219.436.270
2	Kerajinan Mendong	17	890	5.316	2.364.213	6.702.543
3	Anyaman Bambu	24	1.197	13.190	4.975.375	15.384.858
4	Meubel Kayu	6	127	819	370.391	8.346.100
5	Anyaman Pandan	14	654	14.212	5.890.590	5.850.925
6	Gula Aren	20	925	4.049	405.837	54.676.153
7	Gula Kelapa	13	205	2.330	349.500	36.279.350
8	Batik	1	17	50	75.250	374.400
9	Sutera Alam	2	3	75	180.000	2.700.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

Sedangkan potensi perdagangan, antara lain : Perusahaan yang terdaftar sebanyak 5.215 perusahaan, seperti tampak pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Perkembangan penerbitan perijinan

No	Uraian	Tahun 2002
1.	TDP	5.215
2.	SIUP	4.912
3.	Ekspor	US \$ 1.058.046,49
4.	Jumlah Ekspornir	1 (PT. Hini Daiki)
5.	Negara Tujuan	1 (Jepang)
6.	Impor	US \$ 473.673,80
7.	Jumlah Importir	1 (PT. Hini Daiki)
	Jumlah negara	1 (Jepang)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yaitu 5 pasar pemda, dan 28 pasar desa.

2.4.3.2. Koperasi

Jumlah koperasi sebanyak 527 unit, dengan jumlah aset Rp 103,094 milyar, dan volume usaha Rp 105,951 Milyar.

Tabel 2.14.
Jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Tahun 2002
1.	Koperasi	
	- Jumlah Koperasi (bh)	527
	- Jumlah anggota (org)	131.557
	- Aset (juta)	103.094
2.	UKM	
	- Volume Usaha (juta)	105.951
	- Informal	22.810
	- PK (pengusaha kecil formal)	4.809
	- PM (pengusaha menengah formal)	100

Sumber . Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tasikmalaya

2.4.3.3. Badan Usaha Milik Daerah

Saat ini Kabupaten Tasikmalaya memiliki 2 Badan Usaha, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

1. PDAM Tirta Sukapura

Saat ini cakupan pelayanan air bersih sebesar 39.09 %, dengan jumlah pelanggan sebanyak 26.848 Sambungan Rumah (SR), distribusi air bersih 10.379.046 m³. Perusahaan ini mencatat laba bersih sebesar Rp 980,8 Juta pada tahun 2002, hasil audit akuntan publik.

2. PD BPR

PD BPR Kabupaten Tasikmalaya mengembangkan 3 jenis, yaitu : 23 buah BKPD, 7 buah Bank Pasar, dan 3 buah LPK. Dilihat dari tingkat kesehatan, 26 BPR sehat, 6 cukup sehat, dan 1 kurang sehat.

Kondisi PD BPR dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Kondisi PD BPR di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002

	BKPD	Bank Pasar	LPK
Jumlah Lembaga	23	7	3
Asset (Milyar)	44,53	11,74	13,46
Pendapatan (Rp. Milyar)	14,99	3,96	4,47

Sumber : PD BPR Kabupaten Tasikmalaya

2.4.3.4. Produk Unggulan

Pengembangan potensi berbasiskan pada sumberdaya lokal yaitu karakterisitk dan potensi unggulan daerah. Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Core Bisnis yang terdiri dari : Sektor Agribisnis, Sektor Kelautan, Sektor Pertambangan, Sektor Industri kecil dan Menengah, Sektor Pariwisata.

A. Sektor Agribisnis

Komoditas unggulan agribisnis identik dengan komoditas unggulan di sektor pertanian. Berdasarkan penelitian potensi unggulan di Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Universitas Siliwangi, Komoditas unggulan di sektor agribisnis, antara lain : Manggis, Salak, Cabai, Lada, Nilam, Persuteraan Alam, Budidaya Sengon, Sapi Potong, Ternak Domba, Ikan Gurame; serla komoditi-komoditi yang memiliki prospek pengembangan yang baik antara lain : Pandan, Teh, Kelapa, Kakao.

1. Manggis

Manggis banyak dibudidayakan di kecamatan Puspahiang, Salawu, Sukaraja, Salopa, dan Cibalong. Potensi lahan sebesar 10.750 ha baru dapat dimanfaatkan 1.411. ha (13 %), sehingga terdapat peluang pengembangan sebesar 8.952 ha. Produksi tahun 2002 sebesar 5.178 ton, sekitar 45 % sudah diekspor dengan Negara tujuan Korea, Malaysia, Saudi Arabia dll.

Kecamatan Puspahiang, sebagai sentra penghasil dan pemasaran Manggis, memiliki potensi lahan seluas 816 ha, sedangkan yang termanfaatkan baru sekitar 400 ha (50 %).

2. Salak

Dalam percaturan salak tingkat nasional, Tasikmalaya merupakan salah satu sentranya yang lebih dikenal dengan Salak Manonjaya. Daerah penghasil dan pengembangan Salak Tasikmalaya terdapat di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Cibalong, Cineam, Manonjaya, Cibeureum, Kawalu, dan Sukaraja dengan total luas areal salak lokal \pm 7.831 ha dan salak super \pm 350 ha. Salak yang dikembangkan adalah jenis unggul yang lebih dikenal dengan Salak Tasik Super. Produksi rata-rata 2,7 ton/ha dengan potensi produksi 3,5 ton/ha.

Peluang pasar dalam bentuk buah dipasarkan diluar Tasikmalaya, dan sebagian dijadikan bahan olahan seperti : dodol salak, manisan salak, sale salak, yang dikelola oleh Perusahaan Binangkit.

3. *Cabai*

Sentra cabai di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Cisayong, Cigalontang, dan Leuwisari. Produksi cabai dari kecamatan-kecamatan tersebut memiliki karakteristik keburnasan dan kandungan air yang ideal sehingga banyak diminati oleh para pelaku pasar. Pola Produksi cabai dari kecamatan-kecamatan tersebut memiliki karakteristik keburnasan dan kandungan air yang ideal sehingga banyak diminati oleh para pelaku pasar. Pola permintaan cabai relatif tetap sepanjang waktu dengan puncak permintaan menjelang hari raya Idul Fitri, harga mencapai Rp 30.000,-/kg s/d Rp 50.000,-/kg.

4. *Lada*

Lada merupakan jenis rempah-rempah yang mempunyai permintaan cukup tinggi. Di Kabupaten Tasikmalaya pengembangan tanaman lada antara lain : Kecamatan Salopa, manonjaya, Cineam, Cikatomas, Bantarkalong, Salawu, Cisayong, dan Cipatujah; dengan areal tanam seluruhnya diperkirakan mencapai 46 ha dengan produksi rata-rata 19,78 ton rata-rata/tahun. Peluang pasar lada selain memenuhi permintaan dalam negeri, lada juga banyak dibutuhkan oleh pasar luar negeri. Walaupun harga lada juga mengalami fluktuasi, namun harga terendah yang terjadi belum pernah mencapai Rp 25.000,-/kg, harga tertinggi mencapai Rp 100.000,-/kg.

5. *Nilam*

Minyak Nilam merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang memiliki Pengembangan tanaman Nilam antara lain di Kecamatan Salopa, Manonjaya, Cineam, Cikatomas. Pasar dunia saat ini membutuhkan sekitar 1.200-1.400 ton minyak Nilam.

6. *Persuteraan Alam*

Persuteraan alam merupakan rangkaian kegiatan agroindustri yang dimulai dari penanaman murbei, pembibitan, pemeliharaan ulat sutera, pemintalan benang, penenunan kain, sampai pada pemasaran. Luas tanaman murbei di Tasikmalaya 1.141,47 ha tersebar di 19 kecamatan, antara lain yang cukup besar di Kecamatan Pagerageung, Kadipaten, Salawu, Sodonghilir, Singaparna; sementara kecamatan yang masih potensial untuk pengembangan usahatani persuteraan alam diantaranya Kecamatan Jatiwaras, Salopa, dan Tanjungjaya. Produksi kokon per tahun sebesar 8.742,88 k6.

7. *Sengon*

Tanaman Sengon (*Albasia*) menyebar di wilayah Tasikmalaya Selatan dan Utara, antara lain : Kecamatan Salopa, Cikatomas, Pancatengah, Karangnunggal, Cipatujah, Ciawi, dan Pagerageung. Permintaan Kayu *Albasia* bukan hanya didalam negeri, namun juga datang dari manca Negara. Dengan karakteristiknya kayu *Albasia* dapat digunakan sebagai bahan bangunan, peralatan rumah tangga, bahan baku kertas, dan kayu lapis.

8. *Sapi Potong*

Kabupaten Tasikmalaya potensial sebagai penghasil ternak sapi potong, yang banyak diusahakan di wilayah selatan. Walaupun tingkat produksi daging sapi terus meningkat dari tahun ketahun, namun masih belum dapat memenuhi permintaan untuk pasar lokal sekalipun. Permintaan/kebutuhan sapi potong Kabupaten Tasikmalaya sebesar 14.000 ekor/tahun atau 33 ekor/hari, sedangkan produksi/suply sapi potong lokal sebesar 2.100 ekor/tahun sisanya didatangkan dari luar daerah (Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan impor Australia).

9. *Domba*

Usaha ternak domba hampir menyebar dengan merata diseluruh kecamatan bagian utara dan bagian selatan. Usaha ternak domba dalam system usahatani cukup signifikan terhadap penerimaan petani. Disamping permintaan lokal, regional, dan internasional. Pasar ternak domba masih cukup terbuka untuk Negara-Negara di Asia seperti : Brunei Darusalam, Malaysia, dan Singapura.

10. Gurame

Sentra Budidaya ikan Gurame di Tasikmalaya tersebar di beberapa kecamatan antara lain : Singaparna (50 ha), Padakembang (100 ha), Leuwisari (75 ha), Cisayong (60 ha), Manonjaya (17 ha). Kebutuhan lokal untuk konsumsi ikan Gurame Tasikmalaya sebesar 368 ton/tahun, dipenuhi oleh produksi sendiri 293 ton, kekurangannya dipasok dari Kota Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Indramayu, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Produksi benih Gurame sebesar 20.822.000 ekor/tahun, kebutuhan lokal akan benih sebesar 6.200.000 ekor/tahun, selebihnya dipasarkan ke Jakarta, Bogor, Subang, Indramayu, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

11. Pandan

Pandan merupakan komoditi spesifik yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan anyaman, peluang usaha pengembangan komoditi pandan sangat terbuka karena 80 % atau sebesar 370,56 ton/tahun kebutuhan bahan baku serat pandan masih didatangkan dari luar Tasikmalaya dengan harga yang tinggi dan pasokan terbatas. Sentra penanaman pandan di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi Kecamatan Cibalong, Pagerageung, Rajapolah, dan Ciawi. Peluang pasar serat daun pandan untuk memenuhi kebutuhan pengrajin lokal dimana 85 % supply bahan baku masih didatangkan dari daerah luar Kabupaten Tasikmalaya.

12. Teh

Sentra perkebunan teh terdapat di Kecamatan Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir, Cigalontang, dan Culamega, seluas 6.162,32 ha dengan produksi per tahun mencapai 7.108,6 ton teh olahan. Pemasaran langsung ke pembeli di Sukabumi untuk disuply ke pabrik Teh Sosro di Jawa Tengah.

13. Kelapa

Areal tanaman kelapa tersebar di 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas areal 14.735 ha, produk mentah sebesar 70.610 ton/th atau 13.683 ton/ha hasil olahan. Potensi tanaman kelapa antara lain di Kecamatan

Cikalong, Cipatujah, Karangnunggal, Cibalong, Cikatomas, Pancatengah, Cineam. Pemasaran dijual langsung pada pembeli dari Bandung, Jakarta, dan kota-kota lainnya.

14. Kakao

Sentra penanaman Kakao terdapat di Kecamatan Culamega dan Cikatomas dengan produksi hasil olahan sekitar 24 ton/th dengan pemasaran langsung ke pengumpul di Kota Tasikmalaya

15. Ayam Ras

Pada tahun 2002, produksi yang dihasilkan peternak ayam ras terdiri dari DOC Broiler dan DOC pejantan sebanyak 18.355.821 ekor. Dari jumlah tersebut, yang diserap oleh pasar lokal Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2.891.040 ekor (sekitar 15 % dari produksi) setara dengan 4.047.456 kg daging ayam. Yang dikeluarkan ke pasar luar Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Jabotabek dan sekitar Bandung, 15.464.781 ekor setara dengan 21.650,7 ton daging ayam.

Sentra pengembangan ternak ayam di Kecamatan Leuwisari, Singaparna, Sukaratu, Cibalong, Padakembang, dan Pagerageung.

B. Sektor Kelautan

Wilayah pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya sangat potensial untuk pengembangan usaha tambak dengan komoditi : udang karang, kerapu, kakap merah, dan ikan tuna

1. Udang Karang

Produksi udang karang atau yang lebih dikenal dengan *lobster* saat ini masih sangat tergantung pada hasil penangkapan yang menggunakan cara-cara yang sederhana, hal ini berimplikasi pada produktivitas yang rendah.

2. Kerapu

Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas hasil laut yang bernilai ekonomis tinggi. Ikan kerapu hidup di daerah karang atau pasir campur karang, dengan dasar karang yang keras dan dihuni oleh binatang invertebrata, habitat seperti ini dapat ditemui di pantai selatan Tasikmalaya. Untuk menghasilkan ikan

kerapu sesuai permintaan pasar, harus dilakukan penggemukan (*fattening*) pada jaring apung.

3. *Kakap Merah*

Ikan Kakap Merah selain dapat hidup di lautan lepas, juga dapat hidup di tambak (air payau) bahkan di air tawar sekalipun, sehingga dapat dibudidayakan, Budidaya Kakap sudah dapat dilakukan dengan berhasil, baik pembenihan maupun pembesarannya. Pembesaran Kakap Merah dapat diusahakan dengan jarring apung dengan kepadatan 6-8 kg/m².

4. *Ikan Tuna*

Ikan Tuna merupakan komoditas kelautan yang banyak diminati, terutama untuk konsumsi masyarakat golongan menengah keatas. Hingga saat ini, Ikan Tuna masih dihasilkan dari kegiatan penangkapan. Keberhasilan penangkapan sangat ditentukan oleh keterampilan mengenali pola tingkah laku ikan tuna yang berkaitan dengan makan, suhu, salinitas, arus, dan waktu kawin. Selain itu juga ditentukan oleh komponen unit penangkapan.

C. Sektor Pertambangan

Bahan tambang yang potensial dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain zeolit, fosfat, dan batu gamping.

1. *Zeolit*

Cadangan zeolit di Tasikmalaya merupakan bagian dari pegunungan selatan yang membentang mulai dari Kecamatan Cikalong, Karangnunggal, sampai Cipatujah. Eksploitasi zeolit sebagian besar dilakukan oleh masyarakat berupa penambangan rakyat.

2. *Fosfat*

Produksi fosfat digunakan untuk pembuatan pupuk, makanan tambahan ternak, produk makanan, dan minuman. Cadangan deposit fosfat cukup besar terdapat di Deudeul, Cipatujah, dan Cikalong.

3. Gamping

Wilayah-wilayah yang memiliki cadangan batu gamping adalah Kecamatan Cibalong, Parungponteng, Taraju, Karangnunggal, Cipatujah, Cikatomas, dan Cikalong.

D. Sektor Industri Kecil dan Menengah

Seperti diketahui Kabupaten Tasikmalaya terkenal dengan industri kecil kerajinan anyaman, oleh sebab itu produk kerajinan yang menjadi andalan antara lain : anyaman mendong, anyaman pandan, anyaman bambu, dan bordir.

1. Anyaman Mendong

Memiliki 890 unit usaha dan 17 sentra produksi, antara lain di Rajapolah, Salopa, Cibalong, dan Manonjaya. Nilai investasi Rp 2,36 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5 ribu orang, pemasaran 90 % dalam negeri dan 10 % luar negeri. Dibutuhkan promosi yang lebih aktif untuk meningkatkan pasar luar negeri.

2. Anyaman Pandan

Lokasi sentra di Rajapolah, Cibalong, Karangnunggal, Manonjaya. Nilai investasi Rp 5,89 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14 ribu orang, pemasaran 70 % dalam negeri dan 30 % luar negeri.

3. Anyaman Bambu

Memiliki 1.197 unit usaha di 24 sentra produksi, antara lain di Leuwisari, Salawu, dan Singaparna. Nilai investasi mencapai Rp 4,97 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang, pemasaran 80 % dalam negeri dan 20 % luar negeri.

4. Bordir

Memiliki 1.043 unit usaha di 26 sentra produksi, antara lain di Sukaraja, Salopa, Singaparna, Karangnunggal, dan Cikatomas. Nilai investasi mencapai Rp 12,4 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12 ribu orang, pemasarannya lokal dan regional.

E. Sektor Pariwisata

Obyek wisata yang potensial dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Gunung Galunggung, Kampung Naga, Pamijahan, dan Pantai Selatan.

1. Kawasan Wisata Gunung Galunggung

Gunung Galunggung merupakan gunung berapi yang menjadi maskot pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Mempunyai ketinggian 2.167 m dpl, terdapat banyak fasilitas dan aktivitas wisata yang ditawarkan saat ini, antara lain : daya tarik wanawisata meliputi areal seluas 120 ha, pemandian air panas (Cipanas), serta kandungan belerang pada air panas untuk pengobatan dan kesehatan (cure tourism)

2. Lokasi Khas Wisata Budaya Kampung Naga

Kampung Naga merupakan perkampungan tradisional dengan luas areal sekitar 15 ha. Lokasi Khas Wisata Budaya Kampung Naga terletak pada ruas jalan yang menghubungkan Tasikmalaya – Garut. Secara administratif Kampung Naga termasuk kampung Legok Dage Desa Neglasari Kecamatan Salawu.

Event upacara yang ada berupa upacara sasihan meliputi : Idul Adha (10 Dzulhijah), Mendak Taun (28 Muharam), Maulid Nabi (12 Rabiul'Awal), Isro' Mi'raj (27 Rajab), Nisfu Sya'han (1 Ruwah), Idul Fitri (1 Syawal), dan Upacara Pedaran (setiap 8 tahun sekali) jatuh pada bulan Mulud tahun 2008.

3. Lokasi Khas Wisata Ziarah Pamijahan

Pamijahan merupakan lokasi Khas Wisata Ziarah yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantarkalong, sekitar 65 km dari Kota Tasikmalaya ke arah selatan, dengan luas areal sekitar 25 ha. Lokasi Khas Wisata Ziarah ini kental dengan acara-acara ritual agama, hari-hari besar Islam merupakan puncak ramainya pengunjung ziarah ke Pamijahan.

4. Kawasan Wisata Pantai Selatan.

Pantai selatan Tasikmalaya terkenal dengan pantai Cipatujah. Obyek dan daya tarik Wisata Pantai Cipatujah meliputi area kurang lebih 115 ha. Pada akhir tahun biasanya diadakan Hajat Lembur (Pesta Nelayan).

Kawasan Pantai Selatan, selain obyek dan daya tarik wisata Cipatujah terdapat pula obyek dan daya tarik wisata lainnya seperti : Taman Lengser Pantai Sindangkerta dan Konsevasi Penyu, Pantai Pamayangsari dengan Perkampungan Nelayannya, Taman Bubujung Indah, Pantai Ciheras dan Pantai Karang Tawulan.

2.5. Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Tasikmalaya pada saat ini ditunjukkan melalui beberapa variabel antara lain : nilai PDRB, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan per Kapita, dan Laju investasi.

2.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusinya sebesar 35,64 % terhadap produksi bruto. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 4,32 trilyun, yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi sebesar 10,29 %, dengan struktur seperti tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Distribusi Persentase PDRB Menurut Kelompok Sektor

Kelompok Sektor	2002
PRIMER	35.86
1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	35.64
2. Pertambangan dan energi	0.22
SEKUNDER	11.21
3. Industri Pengolahan	5.75
4. Listrik, gas & air bersih	0.77
5. Bangunan/konstruksi	4.69
TERSIER	52.92
6. Perdagangan, hotel dan restoran	28.41
7. Pengangkutan dan komunikasi	3.97
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2.24
9. Jasa-jasa	18.30
Jumlah	100

Sumber : BPS (*angka sementara, diolah)

2.5.2. Inflasi

Inflasi menggambarkan perubahan harga-harga secara umum, yang dihitung dengan pendekatan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam

periode yang telah ditentukan. Tahun 2002 inflasi Kabupaten Tasikmalaya sebesar 10.29 %.

2.5.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 1993. Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2002 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 %. Di sektor primer, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 6.07 % dan sektor pertanian tumbuh 4.19 %. Di sektor sekunder, sektor bangunan tumbuh mencapai 5.59 % dan industri pengolahan 4.73 %.

Tabel 2.17.
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)
1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	4.19
2. Pertambangan dan energi	6.07
3. Industri pengolahan	4.73
4. Listrik, gas & air bersih	2.05
5. Bangunan/konstruksi	5.59
6. Perdagangan, hotel, dan restoran	1.37
7. Pengangkutan dan komunikasi	2.01
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2.62
9. Jasa-jasa	2.28
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.10

Sumber : BPS Kab. Tasikmalaya, angka sementara (diolah)

2.5.4. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita dihitung berdasarkan total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan, merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan tahun 2002 sebesar Rp 905.000,00. Pendapatan per kapita harga berlaku tahun 2002 sebesar Rp 2.853.939,00.

2.5.5. Investasi dan Laju Investasi

Investasi merupakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha. Investasi yang digunakan pada tahun 2002 mencapai Rp 1,93 trilyun.

2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam 4 (empat) dekade terakhir ini, di dunia telah terjadi pergeseran paradigma tentang pembangunan yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) yang terjadi pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) pada dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*) dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada Manusia (*human centered development*) yang dipublikasikan pada awal dekade 90-an. Di Indonesia, pergeseran tersebut terjadi sejalan dengan berkembangnya pemikiran pembangunan di dunia, paradigma baru **Pembangunan Manusia** mulai muncul menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Paradigma ini mengangkat *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* menjadi salah satu alat ukur keberhasilan (*outcome*) pembangunan.

IPM Kabupaten Tasikmalaya pasca pembentukan kota diindikasikan menurun sesuai dengan karakteristik Kabupaten Tasikmalaya yang lebih bernuansakan perdesaan daripada perkotaan. Namun besarnya skor IPM tersebut belum dapat dihitung dengan pendekatan *split area*. Salah satu pendekatan yang mudah dengan presisi yang relatif tepat yaitu dengan pendekatan perbandingan¹ (*benchmarking*) dengan kabupaten lain di Jawa Barat secara series.

Pada tahun 1996 IPM terendah Jawa Barat berada pada kisaran 60-63. Sedangkan setelah melewati puncak krisis tahun 1999 IPM terendah berada pada kisaran 56-61. Dengan mengambil perbandingan tersebut, jika *diasumsikan* pemisahan kota sejak tahun 1999 dan Kabupaten Tasikmalaya berada pada deretan IPM menengah bawah, maka Kabupaten Tasikmalaya diperkirakan mencapai skor IPM 56,50. Sesuai dengan karakteristiknya peningkatan IPM umumnya antara 1-2 point per tahun, namun besaran peningkatan tersebut dalam kondisi Indonesia sekarang ini menurut UNDP dipandang terlalu optimis, peningkatan yang moderat berada antara 0-1 point per tahun. Dengan berbagai

¹Perhitungan IPM Kabupaten Pasca Pembentukan Kota dengan Pendekatan benchmarking ini digunakan pada Perubahan Pertama Renstra Perda No. 33 Tahun 2002. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan data pada masa transisi, pada saat tersebut database pembangunan manusia khusus Kabupaten belum tersedia.

kalkulasi tersebut diperkirakan IPM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001 baru mencapai 58.73 (lihat tabel).

Tabel 2.18.
Estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya
Pasca Pembentukan Kota Tasikmalaya tahun 1998-2010

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka Melek Huruf (AMH)	Daya Beli (Konsumsi/kap/thn)	IPM	Keterangan
1998	63.00	6.20	96.00	413,057	55.75	Kab+Kota Puncak Krisis Ekonomi
1999	65.50	6.30	96.20	577,650	65.30	Kabupaten + Kota
2000	63.00	5.90	95.00	500,000	57.37	Kab. Tanpa Kota
2001	63.50	6.00	95.20	512,500	58.73	Perubahan Pertama
2002	64.00	6.10	95.40	525,313	60.11	Perubahan Pertama
	64.00	6.10	95.40	547,640	61.83*	Realisasi
2003	64.50	6.20	95.60	538,445	61.52	Perubahan Pertama
2004	65.00	6.30	95.80	551,906	62.95	Perubahan Pertama
2005	65.50	6.40	96.00	565,704	64.41	Perubahan Pertama

Sumber : Penjelasan Perubahan Pertama Renstra (Pendekatan Benchmarking)

Pada perubahan kedua renstra, perhitungan IPM tidak lagi menggunakan pendekatan benchmarking sehingga target IPM pada Tabel 2.17 mengalami koreksi. Hal ini disebabkan database pembangunan manusia Kabupaten Tasikmalaya sudah mulai tersedia, sehingga susunan tabel 2.18 mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.18 a
Estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya
Pasca Pembentukan Kota Tasikmalaya tahun 1998-2010

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka Melek Huruf (AMH)	Daya Beli (Konsumsi/kap/thn)	IPM	Keterangan
1998	63.00	6.20	96.00	413,057	55.75	Kab+Kota Puncak Krisis Ekonomi
1999	65.50	6.30	96.20	577,650	65.30	Kabupaten + Kota
2000	63.00	5.90	95.00	500,000	57.37	Kab. Tanpa Kota
2001	63.50	6.00	95.20	512,500	58.73	Perubahan Pertama
2002	64.00	6.10	95.40	525,313	60.11	Perubahan Pertama
	64.00	6.10	95.40	547,640	61.83*	Realisasi
2003*)	65.00	6.40	96.00	595,246	66.41	Perubahan Kedua
2004	65.50	6.50	96.20	610,127	67.95	Perubahan Kedua
2005	66.00	6.60	96.40	625,380	69.52	Perubahan Kedua

*) pendekatan Splitsing Database Pembangunan Manusia Tahun 2002.

Rata-rata peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) per tahun kabupaten kota di Jawa Barat sebesar 0,5 point, RLS 0,1 point per tahun, dan AMH 0,2 point. Sedangkan prediksi daya beli diturunkan dari pendapatan per kapita yang disesuaikan (bagian pendapatan masyarakat yang dikonsumsi). Sehingga

diperoleh angka perkiraan IPM Kabupaten Tasikmalaya seperti diperagakan pada tabel.

IPM Jawa Barat pada tahun 2001 mencapai 66,1, tahun 2002 diharapkan 70,9 dan tahun 2003 diharapkan mencapai 72,4. Untuk mendukung target pencapaian IPM Jawa Barat tersebut, IPM Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mencapai 66,41 tahun 2003. Pada tahun 1999 peringkat IPM Indonesia masih sangat rendah, yaitu 102 dari 162 negara. Peringkat ini masih dibawah Malaysia 56, Filipina 70, Thailand 66, Singapura 26, dan Brunei 32.

Tabel 2.19.

IPM Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 1996 dan 1999

No.	Kabupaten/Kota	AHH		AMH		RLS		Konsumsi/Kapita		IPM	
		1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999
	Jawa Barat									68.9	65.3
1.	Kab. Bogor	63.8	65.2	89.8	93.7	6.8	8.0	585.500	587.520	68.5	66.6
2.	Kab. Sukabumi	61.0	62.4	93.5	96.0	5.4	5.7	583.900	579.200	66.6	63.2
3.	Kab. Cianjur	62.2	63.6	94.4	95.6	6.0	5.7	580.500	576.520	67.6	63.6
4.	Kab. Bandung	65.2	66.6	92.6	94.7	6.6	7.0	585.900	584.450	69.8	66.6
5.	Kab. Garut	58.0	59.4	92.9	96.8	5.7	6.2	568.200	574.420	63.9	61.7
6.	Kab. Tasikmalaya	64.1	65.5	95.1	96.2	6.0	6.3	578.800	577.650	68.7	65.3
7.	Kab. Ciamis	62.5	63.9	92.4	93.9	6.2	6.4	592.200	588.910	68.5	64.8
8.	Kab. Kuningan	63.5	64.9	88.1	91.7	5.8	6.1	589.500	592.580	67.5	65.0
9.	Kab. Cirebon	61.6	63.0	86.2	86.6	5.4	5.7	574.500	581.130	64.6	61.6
10.	Kab. Majalengka	61.6	63.0	87.9	88.9	5.7	6.0	587.600	587.000	66.2	62.8
11.	Kab. Sumedang	65.1	66.5	93.1	95.6	6.4	6.8	590.100	584.570	70.1	66.6
12.	Kab. Indramayu	61.9	63.3	67.0	66.7	3.8	3.9	588.600	588.130	60.4	56.5
13.	Kab. Subang	63.6	65.0	82.4	86.2	4.9	5.4	590.000	591.000	65.7	63.1
14.	Kab. Purwakarta	62.1	63.5	90.7	94.5	5.7	6.2	583.200	585.520	66.8	64.3
15.	Kab. Karawang	61.0	62.4	80.8	84.8	4.9	5.4	582.500	584.720	63.4	60.9
16.	Kab. Bekasi	65.2	66.6	90.1	87.6	8.0	6.8	589.800	582.360	70.6	64.7
17.	Kota Bogor	66.3	67.7	97.7	97.4	8.8	9.3	575.300	586.640	72.3	69.7
18.	Kota Sukabumi	64.3	65.7	99.0	97.6	9.1	8.6	596.600	590.070	73.4	68.4
19.	Kota Bandung	66.8	68.2	97.6	98.3	9.6	9.6	589.800	589.710	74.3	70.7
20.	Kota Cirebon	65.7	67.1	95.1	94.6	8.4	8.4	608.300	586.450	73.7	68.1
21.	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banten										
23.	Kab. Pandeglang	60.2	61.6	91.5	93.2	5.2	5.3	562.400	570.150	63.9	61.2
24.	Kab. Lebak	60.6	62.0	86.4	90.8	5.0	5.5	546.300	570.330	61.6	61.0
25.	Kab. Tangerang	62.4	63.8	88.4	88.7	6.4	6.6	578.500	584.710	66.6	63.5
26.	Kab. Serang	58.2	59.6	88.3	92.2	5.6	5.9	571.300	577.690	63.1	60.8
27.	Kota Tangerang	65.7	67.1	86.4	94.3	7.7	8.8	570.200	585.700	68.3	68.3
28.	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Barat + Banten	62.9	64.3	89.7	92.1	6.4	6.8	591.600	584.200	68.2	64.6

Tabel 2.20.
Kondisi Ideal (sasaran) dan Kondisi Terburuk Komponen IPM

Indikator	Ideal	Terburuk
Angka Harapan Hidup (thn)	85.0	25
Angke Melek Hurup (%)	100	0
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	15	0
Konsumsi riil perkapita yang disesuaikan Tahun 1996 (Rp)	732.700	300.000
Konsumsi riil perkapita yang disesuaikan Tahun 1996 (Rp)	792.800	360.000

Sumber : Petunjuk Operasional laporan Pembangunan Manusia, Bappeda Jabar

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia merupakan penyempuraan dari paradigma pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*) yang dipublikasikan pada awal dekade 90-an. Paradigma ini mengangkat *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* menjadi salah satu alat ukur keberhasilan (*outcome*) pembangunan.

Pada tahun 1996 IPM Kabupaten Tasikmalaya berada pada urutan ke 12 di Jawa Barat dan pada tahun 1999 mengalami peningkatan menjadi urutan ke 10. Sebagai perbandingan pada tahun 1999 IPM Kabupaten Ciamis pada urutan ke 12 sedangkan Kabupaten Gaiut urutan ke 20.

III. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1. Nilai-nilai Strategis

Penyusunan Renstra berawal dari suatu pemikiran menumbuh kembangkan nilai-nilai strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya, artinya pada tahap awal harus sudah jelas nilai-nilai strategisnya. Nilai-nilai strategis dimaksud berkaitan dengan potensi dan karakteristik Daerah Tasikmalaya. Oleh sebab itu nilai-nilai strategis ini dijadikan sebagai landasan dan alasan penyusunan renstra kabupaten.

Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, yang sering dijadikan sebagai suatu kebanggaan atau sebagai pedoman dalam perilaku. Nilai merupakan hasil kesepakatan masyarakat yang diterima sebagai ciri yang membedakannya dengan yang lain. Tasikmalaya memiliki beberapa nilai yang sering dijadikan sebagai penyertaan nilai orang luar untuk memberi sebutan kepada Tasikmalaya.

Analisis untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan dengan melalui optimalisasi potensi yang dimiliki serta meminimalisasi berbagai kendala yang dihadapi. Ruang lingkup analisis lingkungan strategis meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Aspek-aspek yang dianalisa menggunakan analisis SWOT berdasarkan pertimbangan, Potensi Daerah, Kemampuan Ekonomi, Infrastruktur Dasar, Sosial Budaya, dan Pemerintahan.

3.2. Kondisi Internal

3.2.1. Kekuatan (Strenght)

1. *Potensi Daerah*

- Luas Kabupaten Tasikmalaya menurut penggunaannya mencapai 2.563,35 Km², diantaranya seluas ± 207.135,98 ha atau sebesar 80,81 % digunakan untuk kegiatan pertanian.
- Tasikmalaya memiliki potensi sumberdaya cukup besar disektor Industri, pertanian, hortikultur, bahan galian, kelautan, komoditi hasil hutan, dan pariwisata.
- Kabupaten Tasikmalaya memiliki letak geografis yang sangat strategis dilihat dari ekonomi, politik, dan hankam.
- Permintaan konsumsi daging, telur, dan susu untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal.

- Permintaan bahan baku bagi pengrajin kayu, meubel, anyaman bambu, pandan, dan mendong.
- Permintaan pasar yang luas bagi produksi air tawar, ikan laut maupun tambak, serta permintaan konsumsi daging, telur, dan susu untuk memenuhi pasar di daerah sendiri.

2. *Kemampuan Ekonomi*

- Masyarakat Tasikmalaya memiliki daya juang tinggi dalam berwirausaha (Enterpreneurship), khususnya di sektor industri kecil, tercermin dari para pengusaha Tasikmalaya yang mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi.
- Tasikmalaya terkenal sebagai penghasil ikan air tawar yang cukup besar di Jawa Barat. Antara lain jenis ikan : Gurame, ikan mas, nila, tawes, dan nilem.
- Tasikmalaya Selatan memiliki potensi laut dan pesisir, dengan kekayaan ikan diperkirakan mencapai 6.500 ton/thn, serta wilayah pesisir kaya akan pandan laut yang mampu dibudidayakan untuk kebutuhan industri kecil.

3. *Infrastruktur Daerah*

- Prasarana transportasi yang ada khususnya jaringan jalan sepanjang 1.068,50 Km dan jembatan 312 buah dengan panjang 2.577,9 m, serta prasarana irigasi teknis maupun pedesaan untuk melayani areal seluas 55,549 ha, telah dapat melayani sampai ke lokasi kantong-kantong produksi di wilayah Tasikmalaya.
- Sifat masyarakat Tasikmalaya dalam kegotong-royongan sangat baik, dalam upaya penanganan prasarana wilayah.
- Adanya Peraturan perundang-undangan di Bidang Permukiman dan Tata Kota, tersedianya tenaga teknis operasional dari berbagai disiplin ilmu, tersedianya sarana dan peralatan yang relatif memadai, tersedianya program jangka panjang dan jangka pendek, serta tersedianya juklak dan juknis.

4. Sosial Budaya

- Tasikmalaya dikenal sebagai masyarakat santri, disamping memiliki jumlah pesantren yang banyak yaitu 481 buah, dengan jumlah santri sekitar 60.757 orang.
- Adanya kewenangan bidang sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah penduduk usia pra sekolah sebagai potensi yang besar dalam pengembangan lembaga pendidikan pra sekolah, termasuk lulusan siswa dari setiap jenis dan jenjang pendidikan sebagai embrio bagi calon siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Siswa merupakan bagian dari generasi muda sebagai bibit unggul dalam rangka pembinaan kepemudaan, keolahragaan.
- Dalam pengembangan seni budaya, tersedianya guru kesenian dan Pembina kesenian disamping seni dan budaya yang dapat digali dan dikembangkan.
- Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, tersedianya fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

5. Pemerintahan

- Adanya Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Adanya peraturan perundang-undangan yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah.
- Tersedianya tenaga aparatur yang memadai.

3.2.2. Kelemahan (Weakness)

1. Potensi Daerah

- Sebagian besar wilayah Tasikmalaya merupakan dataran tinggi dengan topografi yang berbukit, dan sebagian daerah khususnya di Tasikmalaya Selatan rawan bencana alam.
- Wilayah pertanian Kabupaten Tasikmalaya, sebagian besar terdiri dari wilayah pertanian lahan kering yang sering kekurangan air dan tidak memiliki tata air yang baik, khususnya di Tasikmalaya bagian Selatan.

- Kurang jelasnya tatanan dan aturan yang berkenaan dengan penggalian dan pengelolaan pertambangan, baik yang menyangkut kepemilikan lahan, buruh, maupun pengelolaannya.
- Belum adanya lembaga yang memperluas dan meningkatkan keterampilan budidaya peternakan dan perikanan, dan dilain pihak masih mahal nya makanan ikan.

2. Kemampuan Ekonomi

- Sentra-sentra produksi unggulan pertanian di Tasikmalaya dilihat dari posisinya letak geografisnya relatif jauh dari pusat pemasaran.
- Belum berkembangnya industri pengolahan yang berbasis sumberdaya agribisnis.
- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.
- Sebagian besar industri kecil masih tergantung pada bahan baku dari luar Tasikmalaya.
- Kualitas produksi, kemampuan pemasaran serta pemanfaatan teknologi produksi dan informasi masih relatif rendah, sehingga belum siap untuk kompetitif dengan produk dari daerah lain.
- Tidak adanya lembaga pendidikan yang ikut serta atau bertanggung jawab dalam penyebaran dan meningkatkan keterampilan usaha rakyat.
- Lemahnya jaringan ekonomi antar UKM.

3. Infrastruktur Daerah

- Kondisi jaringan jalan di Tasikmalaya bagian selatan umumnya kurang menunjang terhadap mobilitas pergerakan orang maupun barang, karena keadaannya rusak, dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan berat.
- Lemahnya daya dukung prasarana dan utilitas umum yang menunjang pengembangan kepariwisataan, yang berakibat kurang minatnya investor untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah wisata.
- Lokasi irigasi pedesaan umumnya terletak di daerah terpencil jauh dari jalan aspal sehingga menyulitkan dalam pemeliharaan.
- Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membangun dan memelihara sarana jalan jembatan dan irigasi.

- Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya penataan bangunan dan kesadaran akan lingkungan bersih.
- Lemahnya sumberdaya informasi sebagai basis perencanaan pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas data.
- Kurangnya sistem informasi pertanahan.
- Sarana dan prasarana kurang memadai.
- Penggundulan hutan dan penebangan liar cenderung mengakibatkan terjadinya bencana alam dan menipisnya cadangan air, sehingga menurunnya pasokan air untuk irigasi.
- Adanya resistensi masyarakat dalam melepas tanah miliknya untuk kepentingan pembangunan jalan dan irigasi.
- Adanya aktivitas pertambangan galian C yang merusak prasarana dan sarana jalan dan irigasi.

4. *Sosial Budaya*

- Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk pembangunan bidang sosial kemasyarakatan.
- Adanya indikasi gejala konsumerisme.
- Adanya indikasi meningkatnya masalah narkoba dan perjudian.
- sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dibidang sosial.
- Calon siswa untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan, belum tersalurkan pada sekolah yang tersedia.
- Berdasarkan kualifikasi jumlah guru masih terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- Kegiatan ekstra kurikuler belum terlaksana secara maksimal.
- Pembangunan kesehatan masih berorientasi budget dan kuratif
- Dana kesehatan masih kurang memadai, kualitas SDM kesehatan masih kurang.
- Masih banyaknya tenaga kesehatan rangkap tugas dan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang kurang memadai.

5. Pemerintahan

- Tataan kehidupan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan kurang kondusif, seperti : arus birokrasi yang terkesan panjang, mental ketergantungan yang tinggi pada atasan, kurang inisiatif dan kreatif.
- Kualitas SDM aparatur dan efisiensi serta efektivitas kelembagaan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan, belum terbangunnya sistem akuntabilitas dan pengukuran kinerja, serta belum mampu secara optimal memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki, serta membangun keunggulan kompetitif daerah.
- Jiwa kepemimpinan, profesionalisme, dan kewirausahaan khususnya para pengambil keputusan dalam lingkungan pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan.
- Kurangnya sinergi jaringan kelembagaan daerah.
- Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan.
- Belum adanya peraturan kerjasama dengan luar negeri.
- Kurangnya data yang akurat.

3.3. Kondisi Eksternal

3.3.1. Peluang (Opportunity)

1. Potensi Daerah

- Sesuai kebijakan perwilayahan Propinsi Jawa Barat, bahwa Kota Tasikmalaya berfungsi dan berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Priangan Timur, hal ini akan merupakan peluang bagi Kabupaten Tasikmalaya sebagai pusat pemasaran.
- Permintaan pasar yang luas terhadap produk komoditas pertanian, kerajinan rakyat, maupun industri kerajinan makanan baik di lingkup regional maupun luar negeri (peluang ekspor).
- Permintaan pasar yang luas bagi produksi air tawar, ikan laut maupun tambak, serta permintaan konsumsi daging, telur, dan susu untuk memenuhi pasar di kota-kota besar.

2. *Kemampuan Ekonomi*

- Kebutuhan pasar di kota besar seperti Bandung, Bogor, dan Jakarta.
- Permintaan yang luas akan produk pertanian nilai ekonomi tinggi, seperti : lada, rindu, cengkeh, durian, salak, manggis, cabe, buncis, kokon, kapul, dan kopi.

3. *Infrastruktur Daerah*

- Otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk menetapkan program pembangunan jalan jembatan dan irigasi sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pengelolaan sarana jalan dan irigasi di daerah.
- Meningkatnya kemungkinan untuk mendapatkan bantuan dari luar negeri untuk penanganan jalan jembatan dan sarana irigasi.
- Diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi.
- Terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.
- Tersedianya potensi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- Tuntutan pelayanan yang prima, tertib pertanahan dan pemahaman hukum pertanahan oleh masyarakat.
- Potensi masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi,
- Perubahan kebijaksanaan pemerintah kabupaten dan kota Tasikmalaya.
- Adanya kerjasama antara regulator, operator dan user.
- Pengembangan wilayah dan isu strategis di kawasan andaliman priangan timur yaitu mewujudkan kawasan priangan timur menjadi sentra bisnis yang berwawasan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas pada sektor agribisnis, pariwisata, kelautan, industri kecil dan menengah, serta sumberdaya manusia.
- Fasilitas pondok pesantren yang cukup memadai.

4. *Sosial Budaya*

- Dilaksanakannya otonomi daerah yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan bidang sosial secara lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi objektif dari permasalahan yang ada di daerah.

- Terdapatnya dukungan khususnya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pemerataan pendidikan di setiap jenjang pendidikan dan adanya kebijakan program.
- Penerapan kurikulum yang bersifat kearah pengembangan life skill.
- Peningkatan mutu lulusan tersedianya program Broad Based Education.
- Tersedianya induk organisasi yang membina generasi muda dan olah raga.
- Tersedianya induk dan sanggar organisasi seni budaya yang membina dan menyalurkan bakat seni.
- Tersedianya sarana komunikasi dan transportasi ke semua wilayah.
- Tersedianya IPTEK kesehatan.
- Banyaknya fasilitas pendidikan kesehatan yang ada di Kabupaten dan sekitarnya.

5. Pemerintahan

- Otonomi daerah akan menjadi peluang yang besar bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dan apabila tertata dengan baik dan mengarah pada terciptanya good governance.
- Dilaksanakannya otonomi daerah yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan bidang sosial secara lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi objektif dari permasalahan yang ada.
- Kerjasama dan atau membangun kemitraan antar daerah maupun dengan lembaga lainnya.
- Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi.

3.3.2. Ancaman (Threat)

1. Potensi Daerah

- Wilayah lain dalam cakupan regional yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
- Adanya daerah lain yang memiliki fasilitas cukup lengkap serta pertumbuhan dan perkembangan daerah lain yang cukup pesat.

2. *Kemampuan Ekonomi*

- Masuknya produk-produk import, melemahkan nilai produksi daerah, karena persaingan dalam kualitas dan nilai ekonomisnya.
- Penguasaan para pemilik modal kota yang menguasai pangsa pasar sering membuat para produsen daerah tidak memperoleh imbalan yang layak.
- Globalisasi ekonomi, informasi, demokrasi, dan hak asasi, telah memberikan nuansa baru dalam kehidupan ekonomi dan kehidupan politik.

3. *Infrastruktur Daerah*

- Meningkatnya harga bahan baku untuk pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi.
- Masuknya kendaraan dari luar daerah yang memiliki tekanan gandar melebihi kapasitas beban jalan.
- Bantuan pemerintah pusat yang semakin berkurang terhadap kesinambungan pemeliharaan jaringan infrastuktur wilayah.
- Infrastruktur perbankan, pasar, transportasi dan komunikasi sebagai syarat globalisasi terpusat di kota.

4. *Sosial Budaya*

- Kecenderungan meningkatnya PMKS baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- Adanya transformasi budaya dari luar.
- Berkurangnya bantuan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi.
- Pengaruh dan bahaya konsumerisme, pergaulan bebas, narkoba, dan perjudian yang dapat mempengaruhi mental generasi muda.
- Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kultur dan nilai-nilai luhur yang dapat melunturkan ketahanan budaya bangsa.
- Sebagian kondisi geografis yang mendukung terjadinya endemic malaria, dan masih banyaknya jumlah penduduk miskin

5. *Pemerintahan*

- Adanya kebijakan dan peraturan perundangan baru dari Pemerintah Pusat yang akan merubah tatanan pemerintahan daerah.
- Adanya kebijakan sistem penggajian dan tunjangan struktural maupun fungsional dari pemerintah pusat yang berdampak pada bantuan pendanaan ke daerah.
- Budaya birokrasi yang kurang kondusif.

3.4. **Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi nilai-nilai lingkungan strategis yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka dapat disusun berbagai strategi, yaitu : Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, dan Strategi W-T. Keempat strategi tersebut yaitu sebagai berikut :

3.4.1. **Strategi Kekuatan - Peluang (S - O)**

Strategi S - O, yaitu strategi pencapaian tujuan melalui pengerahan seluruh kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal yang sebesar-besarnya, strategi tersebut dapat di implementasikan kedalam bentuk strategi kebijakan dan aksi operasional sebagai berikut :

Kebijakan :

1. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, serta menciptakan kawasan kantong-kantong produksi baru.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan kawasan pusat kegiatan yang melayani aktivitas regional.
4. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentra-sentra produksi yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatkan pemberdayaan, kemitraan, serta partisipasi stakeholders dalam menyelenggarakan pelayanan sosial.
6. Pemberdayaan olah raga yang berkembang di masyarakat.
7. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam berorganisasi melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan.

8. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada aparaturnya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang dialogis.
10. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha di sentra-sentra produksi.
11. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan/UKM dalam upaya pemulihan krisis ekonomi.
12. Meningkatkan ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana untuk mendukung proses produksi pertanian.
13. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi ekonomi antar wilayah.
14. Meningkatkan kerjasama investasi dan manajemen pemerintah, dan masyarakat dalam pelayanan prasarana dan sarana permukiman.
15. Identifikasi dan inventarisasi segenap sumber daya yang ada di setiap wilayah, untuk memacu pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah.
16. Pengarusutamaan gender.
17. Mensinergikan usaha agribisnis dari hulu sampai hilir.
18. Meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan SDM dan perekonomian daerah.

3.4.2. Strategi Kelemahan - Peluang (W - O)

Strategi W - O, yaitu strategi pencapaian tujuan dengan meminimalkan kelemahan-kelemahan internal dengan cara memanfaatkan peluang eksternal. Strategi kebijakan dan aksi operasionalisasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang.
2. Mengembangkan sistem simpul pertumbuhan wilayah yang mampu menangkap pelaku pergerakan regional.
3. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
4. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan memberikan dorongan atau motivasi untuk menangkap peluang pasar yang lebih luas.
5. Meningkatkan fungsi dan pelayanan prasarana wilayah.
6. Mendorong dan membantu pengembangan prasarana wilayah melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan prasarana wilayah.

8. Meningkatkan pemberdayaan, kemitraan serta partisipasi stakeholders dalam menyelenggarakan pelayanan sosial.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
10. Meningkatkan pemahaman pada semua pihak bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
11. Meningkatkan program life skill, broad based education for life skill dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi.
12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah.
13. Meningkatkan budaya kerja di lingkungan aparat pemerintah daerah.
14. Meningkatkan dan mengembangkan jiwa wirausaha aparat di lingkungan pemerintah daerah.

3.4.3. Strategi Kekuatan Ancaman (S - T)

Strategi S - T, yaitu strategi pencapaian tujuan melalui penggunaan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Uraian dari strategi tersebut secara rinci yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan baik di lingkungan internal maupun eksternal.
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan data dan sumberdaya daerah secara optimal.
3. Menumbuh kembangkan simpul-simpul yang prospektif secara regional.
4. Penetapan dan penerapan rencana tata ruang secara utuh.
5. Meningkatkan pemahaman tentang rencana tata ruang kepada aparat dan masyarakat.
6. Penciptaan lapangan kerja yang langsung mawadahi kepentingan masyarakat.
7. Mengembangkan kapasitas produksi pangan.
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi pengolahan sumberdaya alam.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan ekonomi daerah.
10. Tersedianya fasilitas dan utilitas permukiman yang memadai.
11. Meningkatkan pelatihan manajemen lingkungan permukiman bagi aparat dan masyarakat.
12. Meningkatkan dan mengembangkan prasarana wilayah dalam upaya menunjang produktivitas pangan.

13. Meningkatkan pemahaman tentang rencana tata ruang kepada aparat dan masyarakat.
14. Meningkatkan pelatihan manajemen lingkungan permukiman bagi aparat dan masyarakat.
15. Mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah dan pelestarian sejarah.
16. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam upayaantisipasi masuknya budaya luar yang mengancam nilai-nilai luhur.
17. Mengembangkan lembaga swadaya untuk membangun solidaritas sosial.
18. Perampingan struktur organisasi dan penyusunan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan dan penyempurnaan mekanisme koordinasi diantara penyelenggaraan pemerintahan.
19. Meningkatkan pelatihan manajemen lingkungan Pemerintahan daerah.

3.4.4. Strategi Kelemahan - Ancaman (W - T)

Strategi W - T, yaitu strategi pencapaian tujuan melalui meminimalisasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Strategi ini berangkat dari kondisi yang sangat minimal, yaitu tanpa ada kekuatan pendorong harus meminimalkan kelemahan sekaligus menghindarkan ancaman. Strategi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Penataan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.
2. Meningkatkan ketertiban pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Pengendalian efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengendalian penerimaan pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang.
6. Mengembangkan administrasi pertanahan yang efektif meliputi prosedur penguasaan tanah, hak-hak atas tanah dan pengalihan hak atas tanah.
7. Mempertahankan budaya daerah dan pelestarian peninggalan sejarah.
8. Menekan angka putus sekolah, baik laki-laki maupun perempuan dari tingkat SD sampai SLTP.
9. Memantapkan budaya daerah dan pelestarian peninggalan sejarah.
10. Meningkatkan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan memberikan jaminan sosial.
11. Meningkatkan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat.

12. Meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat miskin dengan memberikan jaminan sosial.
13. Peningkatan kepercayaan terhadap aparatur pemerintah melalui kinerja aparatur dapat dipertanggungjawabkan.

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi

Visi Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran reformasi. Tantangan pembangunan bangsa yang harus didukung oleh semua pemerintahan di wilayah NKRI, dan juga menjadi semangat pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya salah satunya adalah membangun masyarakat madani, peradaban multikultur yang demokratis, hidup keragaman beragama yang inklusif, masyarakat berpengetahuan, rasional, menguasai teknologi, sejalan dengan Pancasila sesuai cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan masyarakat madani mengacu kepada suatu komunitas plural yang saling menghormati dengan prinsip-prinsip : Adl atau adil; Al'amanah atau tanggungjawab; Syura atau musyawarah; ta'aruf atau saling mengenal, saling memahami, saling menghargai; Ta'awun atau kerjasama; dan Taghijr atau perubahan ke arah yang baik.

Dalam mengembangkan sosial ekonomi masyarakat tertuang dalam Misi bangsa Indonesia yang ke-9 : *“Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja”*. Dalam misi tersebut terkandung makna bahwa pembangunan kualitas manusia merupakan isu sentral yang harus ditangani oleh pemerintah. Karena pembangunan kualitas manusia pada dasarnya merupakan upaya mengembangkan inisiatif yang kreatif dari penduduk sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dalam kerangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Paradigma baru, paradigma pembangunan yang bertumpu pada manusia; yaitu memberikan peranan masyarakat bukan sebagai obyek pembangunan, akan tapi sebagai subyek (pelaku) yang menentukan tujuan, menguasai sumber-sumber, dan mengarahkan proses menentukan hidup mereka dalam mencapai kesejahteraan.

Pokok pikiran dari paradigma pembangunan yang bertumpu pada manusia, dijadikan tumpuan dari pengelolaan sumberdaya lokal (*Community Based Resources Management/CBRM*) dalam menghadapi tantangan : kemiskinan,

memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pokok pikiran CBRM salah satunya adalah memanfaatkan potensi setempat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah agraris, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, dijadikan alternatif jalan keluar untuk menghadapi tantangan kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Dilengkapi dengan nilai-nilai luhur daerah yang dijarah dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, menghasilkan lima nilai luhur daerah yang paling diharapkan yaitu : (1) Kesejahteraan; (2) Agama; (3) Kejujuran; (4) Keadilan; (5) Disiplin diri, maka dirumuskan visi Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

"Tasikmalaya yang Religius islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010"

4.2. Penjelasan Visi

4.2.1. Religius/Islami

Makna religius atau keberagamaan sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, jadi makna religius disini mencakup seluruh umat pemeluk agama. Apapun agama yang dipeluknya.

Adapun "Islami" adalah penegasan akan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang 99,9% beragama Islam, namun kenyataan tersebut *tidak berarti* kaum Muslim Tasikmalaya boleh menafikan keberadaan penganut agama lain. Seiring makna Islam yang universal, kaum Muslim percaya bahwa ditengah perbedaan itu terdapat titik-titik persamaan. Karenanya kaum Muslimin Tasikmalaya justru didorong untuk "bekerja-sama" dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda itu dengan bertitik tolak dari "kalimattin sawa" (prinsip atau kalimat yang disepakati bersama).

Keutuhan manusia pada hakikatnya ditentukan oleh dimensi *religius, budaya, dan ilmiah* (Soerjanto Poespowardojo; Strategi Kebudayaan). Dimensi religius menunjukkan, bahwa manusia tidak dapat direduksi menjadi faktor semata-mata. Harus dicegah untuk dijadikan angka yang diprogramkan secara deterministik, tetapi sebaliknya tetap mempertahankan kepribadian, kebebasan,

serta martabatnya. Dengan dimensi ini manusia dapat dihindarkan dari perlakuan ataupun sikap yang sewenang-wenang.

Disamping itu, adalah kenyataan objektif masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menjunjung tinggi religius Islam, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengkalimatan **"Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami..."** sebagaimana terumuskan dalam usulan "visi" dimaksud, tidak berkesan simbolik yang bercorak distinkif (khusus atau tersendiri). Pernyataan *Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami* adalah penegasan atas data (kuantitatif) 99,9% itu. Tasikmalaya yang religius/Islami juga berarti Tasikmalaya yang bebas - bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Bila fokus pandang kita sorotkan pada keberadaan dan perilaku organisasi sosial keagamaan Islam yang berkembang di Tasikmalaya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan harokah Islam lainnya, dan itu dijadikan parameter, maka kaum Muslim Tasikmalaya dipercaya cenderung bersikap terbuka untuk mengadaptasi perubahan atau pun memetik "hikmah" dari peradaban-peradaban lain, Ia cenderung untuk bersikap toleran kepada kemajemukan (pluralitas), bahkan kemajemukan internal kaum Muslim sendiri. Namun demikian kenyataan tersebut tidak berarti kaum Muslim Tasikmalaya boleh menafikan keberadaan penganut agama lain. Seiring makna pengkalimatan *"Religius"*, Islam yang universal, kaum Muslim percaya bahwa ditengah perbedaan itu terdapat titik-titik persamaan. Karenanya kaum Muslimin Tasikmalaya justru didorong untuk "bekerja-sama" dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda itu dengan bertitik tolak dari *"kalimattin sawa"* (prinsip atau kalimat yang disepakati bersama).
- b. Secara historis Tasikmalaya cukup syarat dengan sejarah Islam dan perjuangan nasional. Sejarah telah mencatat bahwa di Kabupaten ini telah lahir ulama-pejuang besar yaitu Syekh Abdul Muhyi, serta KH. Zaenal Mustofa. Syekh Abdul Muhyi adalah murid dari Syekh Abdul Kauf Singkel seorang ulama besar-pejuang yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Nusantara, yang lebih dikenal dengan Syekh Kuala. Melalui Syekh Abdul Muhyi inilah Islam menyebar dengan pesat khususnya di Sukapura (Negeri Mandala), atau Tasikmalaya saat ini. *Penyebaran Islam di Tasikmalaya ini berbasiskan pesantren-pesantren yang keberadaannya ada di setiap kecamatan, dan desa,*

serta mewarnai budaya masyarakat Tasikmalaya. Syekh Abdul Muhyi ini bersama dengan Syekh Yusuf berasal dari Makasar, dan Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Banten, bahu membahu melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pembinaan masyarakat yang berbasis pesantren atau budaya islami ini telah mewarnai lingkungan pemerintah daerah, yang semakin kentara pada saat Tasikmalaya dipimpin oleh Wiradaha III yang merupakan Bupati Sukapura ke-3, memegang pemerintahan tahun 1674-1723. Kabupaten *Tasikmalaya yang religius/islami* dirumuskan sebagai perwujudan untuk mencapai kesejahteraan bathiniah, yang dalam konteks awal jangka pendek disederhanakan pencapaiannya dengan upaya-upaya peningkatan kualitas kehidupan sehari-hari yang diwarnai ahlakul karimah dan nuansa keislaman yang *rohmatan lilalamin* (penebar rahmat dan kedamaian bagi segenap mahluk) serta penuh toleransi.

4.2.2. Maju dan Sejahtera

GBHN 1999-2004 memberikan visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, *maju dan sejahtera*, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berahlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Pengkalimatan maju (termasuk didalamnya makna kesejahteraan masyarakat) bermakna bahwa **kesejahteraan** masyarakatnya adalah **indikator** utama kemajuan suatu daerah. Pembangunan manusia untuk mencapai masyarakat maju dan sejahtera adalah suatu proses untuk memperbesar banyak pilihan bagi masyarakat. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia. Kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan menentukan pilihan juga merupakan hal-hal yang tidak kalah pentingnya.

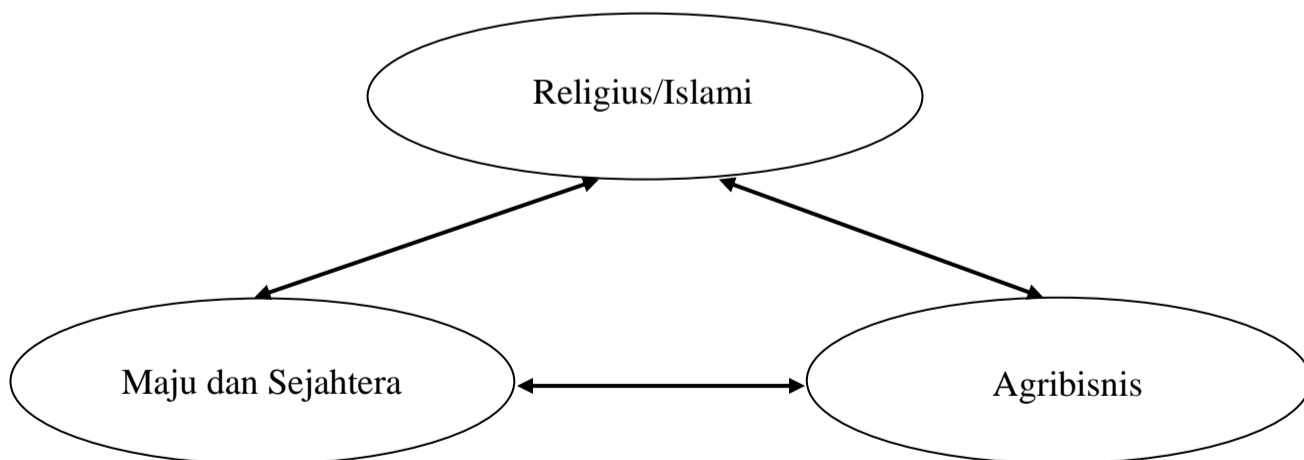
Sebagian aspek dari pembangunan manusia yang maju dan sejahtera dapat diukur dengan indikator *outcome* pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan

lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita). Human Development Report mengelompokkan tingkat pembangunan manusia negara-negara menjadi tiga golongan, yaitu : (1) rendah (0 sampai 49); (2) menengah (50 sampai 79), dan (3) tinggi (80 dan lebih). Laporan Pembangunan Manusia Indonesia mengubah penggolongan untuk daerah di Indonesia menjadi : "tinggi" (65 ke atas), "menengah" (60 sampai 65) "rendah" (dibawah 60). Menurut Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Indonesia Tahun 2001 halaman 49Boks 5.3 alinea 7, kriteria tersebut dapat disesuaikan, kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Untuk dapat membedakan daerah secara lebih baik, penggolongan dapat diubah menjadi : 'tinggi' (65 ke atas); 'menengah' (60-64); dan 'rendah' (dibawah 60).

Dengan menggunakan kriteria Human Development Report, tampaknya berat bagi daerah untuk masuk kategori tinggi, sedangkan menggunakan kriteria LPM Tahun 2001 bagi Kabupaten Tasikmalaya juga terlalu mudah. Oleh karena itu sesuai pengkalimatan Visi, kriteria kita menggunakan standar rata-rata Jawa Barat, sehingga untuk membedakan daerah Kabupaten di Jawa Barat secara lebih baik, berdasarkan data tahun 1999 penggolongan dapat diubah menjadi : “tinggi” (65 ke atas); “sedang” (kurang dari 65). Pada tahun 2010 penggolongan Kabupaten yang maju dan sejahtera di Jawa Barat diperkirakan menjadi : “tinggi” (72 ke atas) dan “sedang” (kurang dari 72). Kondisi IPM lebih dari 72 pada tahun 2010 sebagai indikator pengkalimatan Visi “..... sebagai Kabupaten yang maju

Ketiga kata kunci pada visi tersebut dapat digambarkan menjadi segitiga kebaikan (*virtuous Triangle*) sebagai berikut :



Keterangan Gambar :

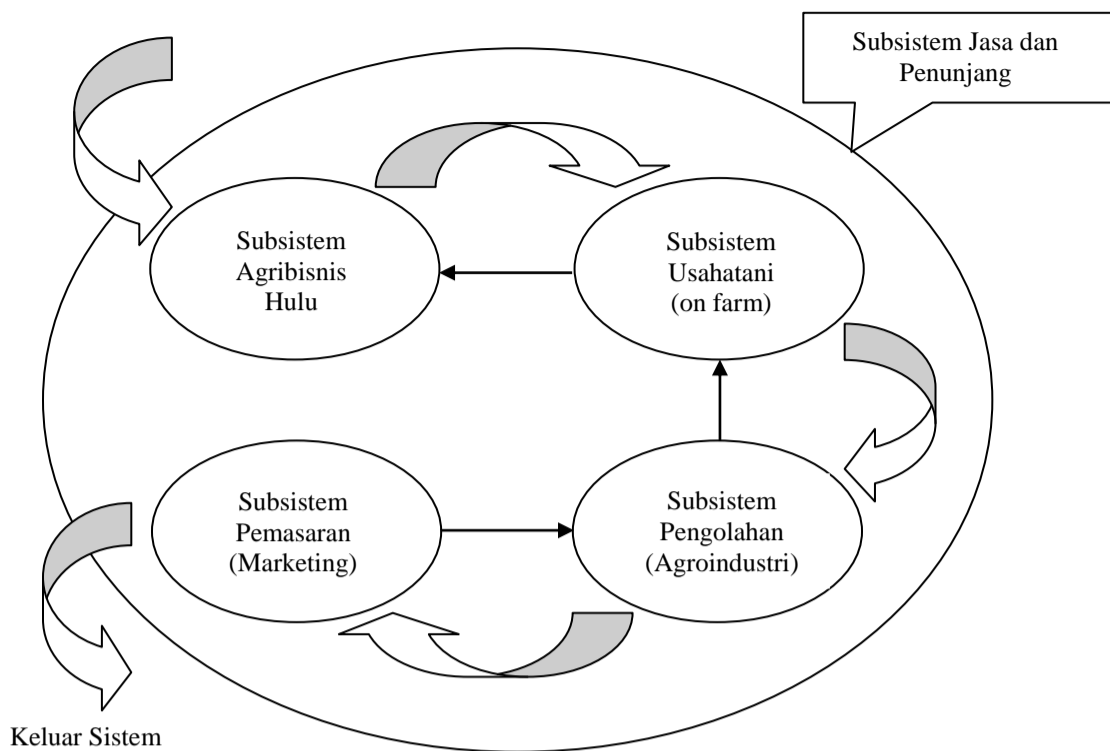
Religius/Islami secara positif mempengaruhi masyarakat yang maju dan sejahtera baik langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatan agribisnis. "Efek langsung" dari religius/islami terhadap masyarakat yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam pemanfaatan agribisnis mengikuti kaidah-kaidah "baldatun thoyyibatun warobbun goffur". Jika diimplementasikan secara efektif, ia akan memberikan tekanan yang kuat pada upaya pemberantasan korupsi dalam kehidupan masyarakat.

4.2.3. Kompetitif dalam Bidang Agribisnis

Makna kompetitif adalah bahwa Kabupaten Tasikmalaya dapat bersaing secara sehat dan profesional dengan daerah lain terutama sektor agribisnis yang akan menjadi andalan Kabupaten Tasikmalaya dalam mensejahterakan masyarakatnya dan memajukan daerahnya.

Sektor agribisnis adalah kegiatan usaha yang berbasiskan pada usaha pertanian dalam lingkup pengertian yang luas. Sektor ini merupakan kelompok sektor primer dengan cakupan area dan pelibatan masyarakat yang sangat luas, sebagai catatan : kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 sebesar 35.64%, sementara penduduk yang bekerja sektor pertanian mencapai 41,13 % dari penduduk usia kerja di Kabupaten Tasikmalaya.

Konsentrasi Kabupaten Tasikmalaya pada pengembangan bidang agribisnis, didasarkan pada kondisi faktual potensi alam dan kehidupan masyarakat yang berpenghidupan dari sektor pertanian. Kelemahan pengembangan sektor pertanian adalah perencanaan yang terlalu sentralistik, kurang mempertimbangkan partisipasi masyarakat, serta terlalu bertumpu pada usahatani (*subsistem on farm*). Padahal usahatani merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dalam system agribisnis yang terdiri dari lima subsistem.



Gambar 4.1. Model Pengembangan Sistem Agribisnis

Pengkalimatan “ kompetitif dalam bidang agribisnis “ Mengandung makna bahwa sektor agribisnis akan dijadikan basis pengembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Peranan utama sektor pertanian difokuskan pada penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal, menyediakan bahan baku untuk mendukung pengembangan sektor industri (kecil dan menengah), dan mengembangkan komoditas unggulan dengan orientasi pasar ekspor untuk meningkatkan pendapatan petani serta menunjang pendapatan daerah.

4.3. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mandiri.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
4. Mewujudkan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat.
5. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis dengan didukung oleh sektor lain.

6. Mewujudkan tata ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

4.4. Faktor Kunci Keberhasilan (Key Success Factor)

1. Tersedianya SDM yang profesional, kreatif, inovatif disertai apresiasi terhadap kinerja yang dihasilkan, berakhlak mulia, toleran, dan mandiri.
2. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah akan perlunya akuntabilitas publik terhadap kebijakan pemerintah.
3. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara eksekutif, legislatif serta masyarakat yang berkepentingan (*stakeholders*).
4. Tersedianya dukungan sumberdaya alam yang berkesinambungan.
5. Adanya keselarasan antara komitmen rencana strategis dengan aplikasi di lapangan.

4.5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan (*goal*) merupakan keadaan yang ingin dicapai dari misi yang telah ditetapkan, tujuan lebih menggambarkan suatu keadaan. Sedangkan Sasaran (*objective*) merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang lebih fokus dan umumnya dapat dikuantifikasi.

4.5.1. Misi Pertama : *Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlakul karimah*

Tujuan :

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Sasaran yang hendak dicapai :

Tertanamnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator pencapaian sasaran:

1. *Menurunnya Tingkat kriminalitas.*
2. *Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan umat seagama.*
3. *Meningkatnya Jumlah pembayar dan nilai Zakat (Muzaki), Infak dan shodaqoh.*
4. *Meningkatnya Legalisasi status hukum tanah wakaf.*

5. *Meningkatnya Jumlah dan nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.*
6. *Meningkatnya Jumlah dan nilai bantuan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.*
7. *Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.*

4.5.2. Misi Kedua : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan mandiri

Tujuan :

1. Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat.

Sasaran yang hendak dicapai :

- a. Tersedianya lembaga pendidikan di setiap jenis dan jenjang baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah yang merata, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Idealnya Rasio siswa terhadap ruang kelas.*
- 2) *Idealnya Rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas.*
- 3) *Idealnya Rasio guru terhadap rombongan belajar.*
- 4) *Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan.*

- b. Tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar.*
- 2) *Meningkatnya Angka Partisipasi Murni.*
- 3) *Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH).*
- 4) *Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).*
- 5) *Meningkatnya Jumlah orang tua asuh.*
- 6) *Menurunnya siswa dropout.*

- c. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang didukung oleh kemandirian masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Menurunnya anemia gizi ibu hamil.*
- 2) *Meningkatnya persalinan dengan tenaga kesehatan (Nakes).*

- 3) *Menurunnya balita gizi buruk.*
- 4) *Meningkatnya pembinaan manusia usia lanjut.*
- 5) *Menurunnya anemia anak sekolah.*
- 6) *Meningkatnya angka kesembuhan Tuberculosis Paru (TBC Paru)*
- 7) *Menurunnya angka kematian akibat infeksi saluran pernafasan akut yang berat (Pneumonia).*
- 8) *Menurunnya angka kesakitan malaria.*
- 9) *Meningkatnya cakupan imunisasi pada Balita (Universal Child Immunisation/UCI).*
- 10) *Menurunnya penemuan kasus lumpuh layu mendadak (Acute Flacid Paralysis/AFP) dan tetanus pada bayi (Tetanus Neonatorum/TN).*
- 11) *Meningkatnya kepala keluarga yang menggunakan air bersih.*
- 12) *Meningkatnya contact rate/rata-rata kunjungan keluarga miskin (Gakin) dengan sarana kesehatan Pemerintah.*
- 13) *Meningkatnya kepala keluarga yang menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat/JPKM.*
- 14) *Meningkatnya Posyandu mandiri dan Poskestren.*
- 15) *Meningkatnya tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat.*
- 16) *Meningkatnya tempat pengelolaan makanan dan minuman (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan*
- 17) *Meningkatnya kualitas air minum.*
- 18) *Meningkatnya kepala keluarga yang menggunakan jamban keluarga.*
- 19) *Meningkatnya penggunaan obat yang rasional (sesuai dosis diagnosa dan kebutuhan pasien) di Puskesmas.*
- 20) *Meningkatnya jumlah pengobatan tradisional (BATRA) yang terbina.*
- 21) *Meningkatnya persentase ketersediaan obat pos kesehatan desa (PKD).*
- 22) *Meningkatnya frekuensi penyuluhan narkoba oleh tenaga kesehatan.*
- 23) *Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan dan praktek tenaga kesehatan yang telah memiliki lisensi (ijin praktek)*
- 24) *Idealnya ratio petugas kesehatan terhadap jumlah penduduk.*

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berbudaya

- a. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, pencatatan, dan pendaftaran penduduk serta terwujudnya mobilitas dan persebaran penduduk yang semakin selaras, serasi dan seimbang, antar wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP).*
- 2) *Menurunnya kepadatan penduduk.*
- 3) *Meningkatnya akseptor KB.*
- 4) *Kepemilikan KTP.*
- 5) *Kepemilikan kartu keluarga.*
- 6) *Kepemilikan Akta.*
- 7) *Penempatan exodan luar jawa.*
- 8) *Pengiriman transmigran.*
- 9) *Pembinaan transmigrasi lokal.*

- b. Terwujudnya peran, kedudukan, partisipasi dan kualitas yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan yang berkeadilan gender.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya peran perempuan di setiap sektor kehidupan.*
- 2) *Menurunnya kekerasan terhadap perempuan.*

- c. Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya angka partisipasi kerja.*
- 2) *Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.*
- 3) *Menurunnya jumlah pencari kerja.*
- 4) *Meningkatnya lapangan pekerjaan.*
- 5) *Meningkatnya jumlah lembaga latihan kerja swasta.*

- d. Terjaminnya hak masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Menurunnya Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).*
 - 2) *Meningkatnya Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).*
- d. Terbinanya olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olah raga
- Indikator pencapaian sasaran :***
- 1) *Meningkatnya prestasi olah raga dalam event-event olah raga.*
 - 2) *Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga.*
- e. Meningkatnya kualitas kepemimpinan pemuda dan berkembangnya jiwa sportivitas di kalangan generasi muda yang berdaya saing unggul dan mandiri.
- Indikator pencapaian sasaran :***
- 1) *Meningkatnya prestasi pemuda.*
 - 2) *Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.*
- f. Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah
- Indikator pencapaian sasaran :***
- 1) *Kuantitas dan kualitas organisasi kesenian daerah.*
 - 2) *Terpeliharanya situs-situs peninggalan sejarah.*
 - 3) *Berkembangnya penggunaan bahasa dan budaya sunda di masyarakat.*
- i. Meningkatnya ketahanan sosial budaya generasi muda dari pengaruh negatif.
- Indikator pencapaian sasaran :***
- 1) *Menurunnya kasus narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.*
 - 2) *Menurunnya peredaran dan penggunaan minuman keras.*
 - 3) *Menurunnya kasus perjudian.*
 - 4) *Menurunnya peredaran video, majalah, tulisan dan segala bentuk pornografi dan pornoaksi.*
 - 5) *Menurunnya kasus pergaulan bebas (sex bebas diluar nikah).*

4.5.3. Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih

Tujuan :

1. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab

Sasaran yang hendak dicapai :

- a. Tersusunnya kewenangan yang dimiliki

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) Ditetapkannya perda kewenangan
- 2) Ditetapkannya ibu kota kabupaten
- 3) Tersusunnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya

- b. Tertatanya kelembagaan aparatur pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) Tersusunnya struktur organisasi tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang ramping struktur kaya fungsi.
- 2) Tersusunnya Uraian Tugas Unit (UTU) di masing-masing dinas / badan / kantor.
- 3) Tersusunnya Renstra dan program kerja di masing-masing dinas / badan / kantor.
- 4) Tersusunnya analisis jabatan, syarat jabatan, dan formasi jabatan pada masing-masing unit kerja.
- 5) Tersusun dan terpenuhinya berbagai jenis jabatan fungsional.
- 6) Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

- c. Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas pegawai negeri

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) Meningkatnya jenjang pendidikan PNS.
- 2) Kesesuaian jabatan dengan latar belakang pendidikan.
- 3) Kesesuaian jabatan dengan golongan ruang.
- 4) Penerapan sanksi yang sesuai dengan pelanggaranannya dan pemberian penghargaan sesuai dengan prestasinya.
- 5) Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan publik.

d. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap perda.*
- 2) *Meningkatnya pengamanan lingkungan dan aset-aset pemda.*
- 3) *Menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat.*

e. Tersedianya prasarana pemerintahan yang memadai

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Tersedianya lahan perkantoran di lokasi ibu kota yang baru.*
- 2) *Terbangun dan tertatanya komplek perkantoran pemerintahan.*

f. Berkembangnya sumber-sumber pembiayaan potensial untuk pembangunan daerah.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya dana-dana sektoral dan investasi yang difasilitasi oleh pemerintah.*
- 2) *Meningkatnya Jumlah PAD.*
- 3) *Meningkatnya Dana Perimbangan.*

2. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian supra dan infrastruktur politik

Sasaran yang hendak dicapai :

Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Menurunnya jumlah unjuk rasa.*
- 2) *Meningkatnya Jumlah penyampaian aspirasi masyarakat melalui saluran yang resmi (media massa, elektronik, lembaga politik).*
- 3) *Meningkatnya Jumlah ormas / LSM yang terdaftar.*
- 4) *Meningkatnya respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.*

3. Terlaksananya pemberantasan praktek-praktek KKN

Sasaran yang hendak dicapai :

Berkurangnya praktek KKN di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Menurunnya penyalahgunaan wewenang.*
- 2) *Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan.*
- 3) *Meningkatnya penanganan kasus-kasus KKN.*

4. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

Sasaran yang hendak dicapai :

Tercapainya manajemen keuangan yang baik.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Komposisi pembelanjaan publik terhadap aparatur.*
- 2) *Meningkatnya realisasi pencapaian keuangan daerah.*
- 3) *Terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.*

5. Penataan dan pemanfaatan data dan informasi secara terarah dan berkelanjutan

Sasaran yang hendak dicapai :

Terwujudnya sistem informasi manajemen pembangunan yang modern.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Tersedianya data dan informasi yang valid.*
- 2) *Penerapan e-Gov (Electronic Government).*

6. Meningkatkan transparansi pelaksanaan pemerintahan.

Sasaran yang hendak dicapai :

Meningkatnya kemudahan masyarakat memperoleh informasi dan komunikasi.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Jumlah pengunjung situs <http://www.tasikmalaya.go.id>*
- 2) *Meningkatnya Sosialisasi peraturan dan kebijakan daerah.*
- 3) *Meningkatnya jumlah penerbitan dan layanan informasi daerah.*

4.5.4. Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat

Tujuan :

1. Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai :

Meningkatnya partisipasi dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) Meningkatnya jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan.

2. Mengurangi laju pertumbuhan penduduk miskin melalui ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Sasaran yang hendak dicapai :

Meningkatnya kondisi sosial-ekonomi keluarga miskin.

Indikator pencapaian sasaran :

Menurunnya laju pertumbuhan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I alasan ekonomi.

3. Mewujudkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai :

- a. Terselenggaranya sistem jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi masyarakat akibat situasi sosial-ekonomi di luar kekuatannya.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) Menurunnya jumlah penyandang masalah sosial.
- 2) Meningkatnya alokasi anggaran untuk penyandang masalah sosial.

- b. Terwujudnya sistem kelembagaan keswadayaan masyarakat

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) Meningkatnya Jumlah lembaga sosial.
- 2) Meningkatnya Jumlah pekerja sosial masyarakat.

4.5.5. Misi Kelima : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis dengan didukung oleh sektor lain

Tujuan :

1. Meningkatkan produktivitas dan produksi serta daya saing kegiatan usaha pertanian, industri kecil, pariwisata dan pertambangan

Sasaran yang hendak dicapai :

- a. Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, pariwisata dan pertambangan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani / masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Produktivitas dan produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan rakyat.*
- 2) *Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan.*
- 3) *Meningkatnya sentra industri.*
- 4) *Meningkatnya produksi pertambangan.*
- 5) *Meningkatnya jumlah sarana prasarana agribisnis kelautan.*
- 6) *Meningkatnya Jumlah Industri dan produksi pengolahan produk pertanian.*
- 7) *Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana perdagangan.*
- 8) *Berkembangnya penerapan teknologi tepat guna.*

- b. Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis, dan mutu yang berkualitas pada waktu yang tepat.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Produksi pangan.*
- 2) *Meningkatnya Jumlah lumbung pangan desa.*
- 3) *Meningkatnya Konsumsi protein / kapita.*
- 4) *Meningkatnya Konsumsi Kalori / kapita.*
- 5) *Meningkatnya Konsumsi hasil ternak / ikan.*

2. Mendorong peningkatan investasi dalam pemanfaatan sumberdaya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional, dan ekspor.

Sasaran yang hendak dicapai :

- a. Meningkatnya arus investasi melalui kerjasama usaha lokal, regional, nasional, maupun internasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional, nasional, dan ekspor.

Indikator Pencapaian Sasaran :

- 1) *Meningkatnya Promosi dagang.*
- 2) *Meningkatnya Nilai investasi swasta.*
- 3) *Meningkatnya Nilai ekspor dan impor.*
- 4) *Meningkatnya Kemitraan usaha.*
- 5) *Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja di bidang agribisnis dan potensi unggulan.*

- b. Meningkatnya kemampuan dan peran BUMN, BUMD, koperasi dan lembaga keuangan lainnya dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Jumlah modal usaha dan aset lembaga-lembaga ekonomi.*
- 2) *Meningkatnya bantuan kemitraan dari BUMN, BUMD dan lembaga usaha lainnya.*

4.5.6. Misi Keenam : *Mewujudkan tata ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan*

Tujuan :

1. Mengoptimalkan penataan ruang yang partisipatif di berbagai tingkatan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai :

- a. Terwujudnya rencana tata ruang yang partisipatif, dengan prioritas bagi daerah yang strategis.

Indikator Pencapaian Sasaran :

- 1) *Meningkatnya jumlah wilayah yang memiliki rencana tata ruang.*
- 2) *Meningkatnya jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam proses penataan ruang.*
- 3) *Meningkatnya kepemilikan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan yang diserahkan ke pemerintah daerah.*

- b. Adanya kebijakan, peraturan, mekanisme perijinan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya perda tata ruang.*
- 2) *Meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan.*
- 3) *Meningkatnya penerbitan fatwa rencana tata ruang.*
- 4) *Menurunnya jumlah pelanggaran terhadap perda tata ruang.*

- c. Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, permukiman perkotaan dan perdesaan.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya kegiatan sosialisasi tata ruang.*
- 2) *Meningkatnya kesesuaian peruntukan lahan.*
- 3) *Menurunnya kerawanan hutan.*
- 4) *Meningkatnya penanggulangan lahan kritis.*

2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang memadai untuk memajukan perekonomian daerah.

Sasaran yang hendak dicapai :

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.*
- 2) *Meningkatnya luas areal sawah irigasi.*
- 3) *Meningkatnya kualitas Jaringan irigasi teknis.*
- 4) *Meningkatnya jumlah dan tipe terminal.*
- 5) *Meningkatnya Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.*

3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang tertib, aman, dan nyaman serta meningkatkan pelayanan prasarana dasar, dan utilitas umum

Sasaran yang hendak dicapai :

Meningkatnya fungsi, peranan dan intensitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai kemampuan dan daya dukung lingkungan.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Cakupan jaringan air bersih.*
- 2) *Meningkatnya Cakupan pelayanan persampahan.*
- 3) *Meningkatnya jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial.*

4. Mengatur dan melaksanakan penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah.

Sasaran yang hendak dicapai :

Terwujudnya sistem penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Jumlah bidang tanah yang didistribusi.*
- 2) *Jumlah peta / revisi penggunaan tanah.*
- 3) *Jumlah peta penguasaan tanah.*
- 4) *Jumlah penyelesaian masalah pertanahan.*
- 5) *Jumlah surat keputusan ijin lokasi / penetapan lokasi.*
- 6) *Monitoring pemanfaatan tanah.*

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tanpa mengabaikan daya dukung dan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

Sasaran yang hendak dicapai :

Meningkatnya produktivitas SDA, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan / pencemaran lingkungan.

Indikator pencapaian sasaran :

- 1) *Meningkatnya Jumlah ijin Usaha Pertambangan.*
- 2) *Meningkatnya Jumlah Areal yang direklamasi.*
- 3) *Meningkatnya Jumlah ijin pengambilan air bawah tanah (ABT).*
- 4) *Terjaganya Lingkungan Hidup.*
- 5) *Menurunnya Luas lahan kritis.*
- 6) *Menurunnya Luas kawasan lindung yang rusak.*
- 7) *Meningkatnya Hutan Rakyat.*

V. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, akan dicapai melalui strategi yang terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan untuk masing-masing misi.

5.1. Misi Pertama : Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlaqul karimah.

Tujuan :

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Sasaran :

Tertanamnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan :

Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah.

Program :

a) Peningkatan Pelayanan keagamaan

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana keagamaan.
- (2) Mempublikasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh.

b) Peningkatan peran pesantren secara optimal

Kegiatan :

Memberi bantuan sarana dan prasarana keagamaan

c) Peningkatan koordinasi lembaga keagamaan

Kegiatan :

- (1) Membina lembaga-lembaga keagamaan
- (2) Membentuk forum dan memberdayakan komunikasi antar umat beragama.

5.2. Misi Kedua : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan mandiri.

Tujuan :

1. Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat.

Sasaran :

- a. Tersedianya lembaga pendidikan di setiap jenis dan jenjang baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah yang merata, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat

Kebijakan :

Memberdayakan lembaga pendidikan, sekolah dan luar sekolah.

Program :

Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan pra sekolah, dasar, menengah, kejuruan, dan luar sekolah.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang memadai.
 - (2) Meningkatkan fasilitas penunjang pembelajaran.
 - (3) Melaksanakan Pendidikan dan Latihan terhadap siswa dan tenaga pengajar.
 - (4) Menyusun kurikulum muatan lokal yang berbasis kompetensi.
 - (5) Menambah tenaga kependidikan
- b. Tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kebijakan :

Menekan angka putus sekolah baik laki-laki maupun perempuan dari tingkat SD/MI sampai SLTP/MTs.

Program :

Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat.

Kegiatan :

- (1) Mengembangkan SLTP Terbuka.
 - (2) Mengembangkan Pendidikan luar sekolah.
 - (3) Menyelenggarakan dan menambah daya tampung sekolah regular.
 - (4) Memberi Beasiswa dan DBO, serta mendorong gerakan orang tua asuh.
- c. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang didukung oleh kemandirian masyarakat.

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Program :

- a) Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan, farmasi, dan sumberdaya kesehatan

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan Pemenuhan dan pengembangan SDM Kesehatan.
- (2) Merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana kesehatan.
- (3) Meningkatkan manajemen pelayanan prima.
- (4) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan bahan berbahaya.
- (5) Melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya terhadap kesehatan.
- (6) Menyediakan obat dan alat kesehatan.
- (7) Melaksanakan pembinaan terhadap sarana farmasi.

- b) Pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pencegahan penyakit dengan imunisasi.
- (2) Melaksanakan penemuan dan pengobatan penderita penyakit menular.
- (3) Melaksanakan pengamatan penyakit dan pemutusan rantai penularan penyakit.
- (4) Melaksanakan pengawasan kualitas air, makanan dan minuman, udara, dan lingkungan lain.
- (5) Mengembangkan sanitasi dasar

- c) Pelayanan dan pembinaan kesehatan keluarga

Kegiatan :

- (1) Meningkatkan status gizi masyarakat
- (2) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan GAKY, defisiensi vitamin A, dan anemia.
- (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan manula.

- d) Bina program dan promosi kesehatan

Kegiatan :

- (1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, program kesehatan.
- (2) Mengembangkan sistim informasi manajemen kesehatan.
- (3) Mengembangkan promosi kesehatan.
- (4) Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) dan usaha kesehatan berswadaya masyarakat (UKBM) lainnya.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berbudaya

Sasaran :

- a. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk, pencatatan, dan pendaftaran penduduk serta terwujudnya mobilitas dan persebaran penduduk yang semakin selaras, serasi dan seimbang, antar wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kebijakan :

- 1) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan tertib administrasi kependudukan

Program :

- a) Pengembangan Kebijakan Kependudukan

Kegiatan :

Melaksanakan Pencatatan akta pendaftaran penduduk (KK &KTP).

- b) Peningkatan pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan advokasi

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pendewasaan usia perkawinan (PUP).
- (2) Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja.
- (3) Melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

- c) Pengaturan kelahiran melalui program KB

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana
- (2) Memberikan dukungan alat kontrasepsi serta ayoman bagi keluarga Pra-KS alasan ekonomi dan KS-1 Alasan ekonomi

- 2) Persebaran penduduk

Program :

Mobilitas dan Persebaran Penduduk

Kegiatan :

Melaksanakan penempatan dan pembinaan transmigrasi Lokal

- b. Terwujudnya peran, kedudukan, partisipasi dan kualitas yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan yang berkeadilan gender.

Kebijakan :

Pengarusutamaan gender (Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender).

Program :

- a) Peningkatan Pemahaman Gender

Kegiatan :

(1) Melaksanakan Sosialisasi dan advokasi Kesetaraan dan Keadilan gender.

(2) Membangun sensitivitas gender.

- b) Peningkatan kemampuan dan kemandirian perempuan

Kegiatan :

(1) Mengadakan pelatihan peningkatan kegiatan ekonomi produksi.

(2) Meningkatkan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

(3) Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

- c. Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan

Kebijakan :

Penciptaan lapangan kerja yang langsung mawadahi kepentingan masyarakat.

Program :

Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Kegiatan :

(1) Memperluas kesempatan lapangan kerja.

(2) Melaksanakan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama.

(3) Meningkatkan keterampilan pencari kerja.

(4) Mengembangkan sistim dan menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan.

- (5) Memberikan Penyuluhan dan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
- d. Terjaminnya hak masyarakat untuk hidup sejahtera lahir batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Kebijakan :

- 1) Mendorong dilaksanakannya penanganan PMKS dengan memperhatikan skala prioritas.

Program :

Pengembangan bentuk penanganan dan jangkauan pelayanan.

Kegiatan :

Memberikan bimbingan dan memfasilitasi PMKS.

- 2) Mengembangkan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Program :

- a) Peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial

Kegiatan :

Melaksanakan pemberdayaan karang taruna, PBM dan Organisasi sosial.

- b) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial

Kegiatan :

- (1) Melakukan sosialisasi program perlindungan sosial.
- (2) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan.
- (3) Mengembangkan pemberdayaan komunitas masyarakat adat.

- e. Terbinanya olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olah raga.

Kebijakan :

Pemberdayaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

Program :

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pembinaan atlit, pelatih, dan organisasi olah raga.
- (2) Memberikan bantuan sarana dan prasarana olah raga.
- (3) Memasyarakatkan olah raga melalui lembaga pendidikan.

- f. Meningkatnya kualitas kepemimpinan pemuda dan berkembangnya jiwa sportivitas di kalangan generasi muda yang berdaya saing unggul dan mandiri.

Kebijakan:

Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam berorganisasi melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan.

Program :

Peningkatan kualitas kelembagaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pemberian kesempatan generasi muda dalam berorganisasi.

Kegiatan :

Melaksanakan Pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan, OSIS, UKS, PKS, dan pramuka.

- g. Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

Kebijakan :

Mempertahankan budaya daerah dan pelestarian peninggalan sejarah.

Program :

- a) Pelestarian serta pengembangan budaya dan peninggalan sejarah

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pemeliharaan bangunan, prasasti, situs bersejarah.
- (2) Menggali sejarah dan budaya Kabupaten Tasikmalaya.

- b) Pembinaan kesenian daerah

Kegiatan :

- (1) Mengaktifkan sanggar-sanggar kesenian dan budaya daerah.
- (2) Melaksanakan misi dan pentas kesenian.

- h. Meningkatnya ketahanan sosial budaya generasi muda dari pengaruh NAPZA, miras, perjudian, dan pornografi.

Kebijakan :

Penanggulangan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi.

Program :

Pencegahan dan penanggulangan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan bahaya NAPZA, miras, perjudian dan pornografi.

- (2) Menyusun database dan publikasi penuntasan kasus-kasus NAPZA, miras, perjudian dan pornografi.
- (3) Membentuk tim terpadu penanggulangan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi.
- (4) Melaksanakan operast pemberantasan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi.
- (5) Melakukan pembinaan korban NAPZA.

5.3. Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih

Tujuan :

1. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab

Sasaran :

- a. Tersusunnya kewenangan yang dimiliki

Kebijakan :

Penetapan kewenangan dan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya

Program :

Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

Kegiatan :

Menyediakan lahan dan membangun fasilitas pemerintahan dan sosial

- b. Tertatanya kelembagaan aparatur pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

Kebijakan :

Membangun organisasi yang proporsional dan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan : kewenangan pemerintah, karakteristik potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak lain.

Program :

Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, serta pengembangan jabatan fungsional.

Kegiatan :

- (1) Menyusunan kesisteman organisasi mencakup aspek kelembagaan dan aspek ketatalaksanaan.

- (2) Merumuskan jabatan fungsional.
- (3) Mensosialisasikan kewenangan.
- (4) Melaksanakan pembinaan program kerja dan pelaksanaan tugas unit kerja.

c. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai negeri

Kebijakan :

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada aparatur baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas kerja pegawai.

Program :

Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pembinaan karir.
 - (2) Melaksanakan pemberian kesejahteraan.
 - (3) Menerapkan sanksi dan penghargaan serta sistem administrasi kepegawaian yang tertib.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada publik

Program :

Pelayanan prima.

Kegiatan :

- (1) Menyusun standar minimal pelayanan pada publik.
- (2) Melaksanakan standarisasi rekrutment PNS.

d. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum.

Kebijakan :

Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Program :

Peningkatan Ketertiban Umum.

Kegiatan :

- (1) Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

e. Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai.

Kebijakan :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah.

Program :

Peningkatan prasarana dan sarana pemerintahan.

Kegiatan :

Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana gedung pemerintahan .

- f. Berkembangnya sumber-sumber pembiayaan potensial untuk pembangunan daerah.

Kebijakan :

Meningkatkan kerjasama jaringan kelembagaan pembiayaan pembangunan.

Program :

- a) Kerjasama dengan lembaga donor / pemerintah propinsi / pemerintah pusat.

Kegiatan :

- (1) Mengusulkan dan menyalurkan dana bantuan program.
- (2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi.

- b) Kerjasama dengan lembaga keuangan.

Kegiatan :

Mengusahakan pinjaman kredit lunak.

- c) Kerjasama bisnis

Kegiatan :

Melakukan kerjasama bisnis dengan investor.

2. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian supra dan infrastruktur politik.

Sasaran :

Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang demokratis

Program :

Pendidikan politik masyarakat serta kemandirian infrastruktur politik

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan sosialisasi perundang-undangan bidang politik dan yang lainnya.
 - (2) Mengikutsertakan tokoh masyarakat, ormas/LSM, parpol dalam diklat ditingkat propinsi.
 - (3) Melaksanakan inventarisasi orpol, ormas/LSM.
- 2) Memantapkan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa

Program :

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa.
- (2) Mengembangkan dan mengevaluasi penanganan konflik sosial.

3. Terlaksananya pemberantasan praktek-praktek KKN.

Sasaran :

Berkurangnya praktek KKN di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan

Program :

Perencanaan daerah.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.
- (2) Menyusun perencanaan tahunan daerah sesuai Renstra dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

- 2) Meningkatkan kinerja aparatur

Program :

Peningkatan pengawasan dan pengendalian

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pengawasan aparatur.
- (2) Mengendalikan administrasi pelaksanaan APBD.
- (3) Melaksanakan Kaji tindak dugaan penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan.
- (4) Melaksanakan Audit eksternal dan publikasi dana-dana pemberdayaan dan dana masyarakat.

(5) Menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat.

4. Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Sasaran :

Tercapainya manajemen keuangan yang baik

Kebijakan :

1) Pengendalian Penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya

Program :

Pengembangan potensi PAD.

Kegiatan :

- (1) Melakukan pendataan potensi objek pajak dan retribusi daerah.
- (2) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.
- (3) Melakukan uji efisiensi pemungutan pajak dan retribusi pada dinas penghasil.

2) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Program :

Penataan pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pelatihan perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat.
- (2) Menyusun Perda Pokok-pokok keuangan daerah.
- (3) Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan daerah.
- (4) Melaksanakan Bintek penatausahaan keuangan daerah.
- (5) Menyusun pedoman usulan kegiatan berupa RPJM dan RPTD.

5. Penataan dan pemanfaatan data dan informasi secara terarah dan berkelanjutan

Sasaran :

Terwujudnya sistim informasi manajemen pembangunan yang modern.

Kebijakan :

1) Pengembangan sistim informasi manajemen pembangunan komprehensif secara bertahap

Program :

Peningkatan data dan informasi yang berkualitas/aktual dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan Inventarisasi, kompilasi, dan analisa data informasi.
 - (2) Menyusun master plan/blue print Pengembangan dan pembangunan E Gov.
 - (3) Membangun sistem informasi Manajemen pembangunan.
 - (4) Melaksanakan Up dating peta-peta
 - (5) Menyusun Sistem Informasi Profil Daerah.
- 2) Peningkatan fungsi dan peran lembaga penelitian di daerah untuk percepatan pembangunan (Kepmendagri No. 40 Tahun 2000).

Program :

Peningkatan penelitian dan pengembangan daerah.

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan pengembangan/peningkatan kapasitas pemerintahan untuk desentralisasi.
 - (2) Meningkatkan dan mengembangkan jaring kerjasama penelitian daerah (Jarlit).
 - (3) Melaksanakan Survey dan Penelitian lapangan untuk penilaian dan prioritas usulan pembangunan.
 - (4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan perekonomian dan sumber daya alam.
 - (5) Melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek-aspek pendidikan, kesehatan, dan kesra.
 - (6) Melaksanakan penelitian dan pengembangan fisik prasarana dan infrastruktur wilayah.
 - (7) Menyusun master plan pengembangan kawasan pertumbuhan di Utara Kabupaten Tasikmalaya.
 - (8) Membangun workshop sebagai wahana pengembangan riset dan teknologi daerah
6. Meningkatkan transparansi hasil pelaksanaan pemerintahan.

Sasaran :

Meningkatnya kemudahan masyarakat memperoleh informasi dan komunikasi.

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang dialogis.

Program :

Peningkatan penerangan komunikasi dan media massa.

Kegiatan :

- (1) Menyebarkan informasi melalui e Gov, media cetak, dan elektronik.
- (2) Mempublikasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- (3) Melaksanakan forum dialog interaktif (temu wicara dan sambung rasa).
- (4) Mengembangkan kemitraan dengan pers.

5.4. Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat

Tujuan :

1. Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya partisipasi dan kemampuan ekonomi masyarakat

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kapasitas lembaga sosial-ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Program :

Pengembangan Kelembagaan Sosial-ekonomi masyarakat.

Kegiatan :

- (1) Mengadakan Pelatihan dan pembinaan pada lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat
 - (2) Melaksanakan pengkajian potensi sosial ekonomi pondok pesantren
 - (3) Memberikan bantuan yang bersifat stimulan pada lembaga sosial ekonomi masyarakat
- 2) Menciptakan dan meningkatkan peran sosial ekonomi pondok pesantren dan kelembagaan lainnya

Program :

Pengembangan jaringan sosial-ekonomi pondok pesantren

Kegiatan :

Memfasilitasi forum kerjasama sosial-ekonomi antar pondok pesantren

2. Mengurangi laju pertumbuhan penduduk miskin melalui ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Sasaran :

Meningkatnya kondisi sosial-ekonomi keluarga miskin.

Kebijakan :

Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (Pra-S dan KS-1 alasan ekonomi).

Program :

- a) Pembinaan ketahanan keluarga

Kegiatan :

- (1) Memberikan bimbingan mengenai fungsi keluarga pada keluarga miskin yang memiliki balita, remaja, dan lansia, serta memberikan bantuan pada keluarga miskin.
- (2) Memberikan bantuan berupa pengetahuan dan keterampilan siklus keluarga.

- b) Peningkatan kesejahteraan keluarga

Kegiatan :

- (1) Membuat database dan standarisasi keluarga miskin (Pra-S dan KS-1 alasan ekonomi).
- (2) Memberikan bantuan pada keluarga miskin (Pra-S dan KS-I alasan ekonomi).
- (3) Memberikan bantuan Modal Usaha pada keluarga miskin (Pra-S dan KS-1 alasan ekonomi).

- d) Kerjasama kelembagaan lokal, nasional, dan internasional dalam bidang sosial ekonomi.

Kegiatan :

- (1) Mengadakan kerjasama dalam memberikan bantuan.
- (2) Memberikan pelatihan keterampilan dan magang.

3. Mewujudkan sistim jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sasaran :

- a. Terselenggaranya sistem jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi masyarakat akibat situasi sosial-ekonomi di luar kekuatannya.

Kebijakan :

Membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat.

Program :

Perlindungan sosial dan perlindungan masyarakat (Linsos dan Linmas)

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan Pelatihan, dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Memberikan bantuan pada penyandang masalah sosial

- b. Terwujudnya sistem kelembagaan keswadayaan masyarakat

Kebijakan :

Mengembangkan lembaga swadaya untuk membangun solidaritas sosial.

Program :

Pengembangan kelembagaan swadaya masyarakat.

Kegiatan :

- (1) Memfasilitasi lembaga-lembaga sosial yang ada.
- (2) Membentuk kemitraan dengan lembaga sosial masyarakat.

5.5. Misi Kelima : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis dengan didukung oleh sektor

Tujuan :

1. Meningkatkan produktivitas dan produksi serta daya saing kegiatan usaha pertanian, industri kecil, pariwisata dan pertambangan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, pariwisata dan pertambangan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/masyarakat.

Kebijakan :

- 1) Mengembangkan kawasan ekonomi lokal.

Program :

- a) Pengembangan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan wilayah komoditas dan pengembangan komoditi unggulan.

Kegiatan :

Menentukan perwilayahan komoditas sentra produksi.

- b) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan sentra pengembangan ekonomi.

Kegiatan :

- (1) Membangun sarana dan prasarana agribisnis.
- (2) Mengembangkan rekayasa teknologi.
- (3) Membangun terminal agribisnis.
- (4) Menyediakan sumber energi.
- (5) Membangun sarana transportasi.

- 2) Mengembangkan komoditas unggulan daerah.

Program :

Peningkatan usaha komoditas unggulan.

Kegiatan :

Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, eksplorasi, eksploitasi, dan integrasi vertikal dan horizontal.

- 3) Mengembangkan kegiatan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

Program :

Penerapan Teknologi Tepat Guna.

Kegiatan :

- (1) Menerapkan Teknologi Tepat Guna : (a) Produksi; (b) Pengolahan; (c) Design; (d) Packaging; (e) Penyimpanan; (f) Pengolahan limbah; (g) Informasi.
- (2) Melaksanakan pengembangan Warintek.

- 4) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam menciptakan kawasan potensi ekonomi baru.

Program :

- a) Pengembangan potensi pariwisata.

Kegiatan :

Menata obyek dan daya tarik wisata

- b) Penggalian potensi pertambangan

Kegiatan :

- (1) Menata kawasan pertambangan rakyat.
- (2) Melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan rakyat.

- b. Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis, dan mutu yang berkualitas pada waktu yang tepat.

Kebijakan :

Mengembangkan kapasitas produksi pangan.

Program :

- a) Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan

Kegiatan :

- (1) Meningkatkan mutu intensifikasi.
- (2) Mengoptimalkan sumber daya lahan.
- (3) Menyediakan lumbung pangan desa dan peningkatan teknologi tepat guna untuk penyimpanan pangan.
- (4) Melaksanakan pembinaan ketahanan pangan.
- (5) Melaksanakan Perbaikan penanganan paska panen.

- b) Diversifikasi komoditas pangan

Kegiatan :

Melaksanakan pengaturan pola tanam dan tumpangsari.

- c) Perlindungan komoditas pangan

Kegiatan :

Melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan hama/penyakit pada komoditas pangan

- d) Penganekaragaman hasil produk pangan.

Kegiatan :

Mengembangkan produk olahan (agroindustri) pangan.

2. Mendorong peningkatan investasi dalam pemanfaatan sumberdaya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional, dan ekspor.

Sasaran :

- a. Meningkatnya arus investasi melalui kerjasama usaha lokal, regional, nasional, maupun internasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional, nasional, dan ekspor.

Kebijakan :

- 1) Memperluas dan mengembangkan kesempatan berusaha.

Program :

- a) Penyusunan database informasi potensi bisnis daerah

Kegiatan :

Menyusun dan mempublikasikan database dan promosi potensi bisnis daerah.

- b) Kemudahan perijinan

Kegiatan :

Memberikan pelayanan prima pada usaha.

- c) Kepastian dan keamanan berusaha

Kegiatan :

Menegakan peraturan dan hukum.

- d) Penekanan ekonomi biaya tinggi

Kegiatan :

(1) Melaksanakan penataan dan penghapusan retribusi yang memberatkan.

(2) Memberikan pelayanan satu atap.

(3) Mempermudah informasi dan mempercepat proses perijinan.

(4) Mengembangkan kompetensi kegiatan usaha dan SDM.

(5) Mengembangkan jaringan perdagangan dan forum kerjasama ekonomi antar daerah.

- e) Penguatan Jaringan Pasar

Kegiatan :

(1) Membentuk jaringan kerjasama pemasaran.

(2) Mengadakan promosi.

- f) Kerjasama kelembagaan

Kegiatan :

Melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Manaj. Produksi, Manaj. Operasi, Manaj. Keuangan, Regulasi, HaKI, Kepabeanan, kontrak bisnis, bahasa asing).

- b. Meningkatnya kemampuan dan peran BUMN, BUMD, koperasi dan lembaga keuangan lainnya dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah.

Kebijakan :

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pola kerjasama kemitraan dengan KUKM dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

Program :

- a) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha kecil, menengah, dan koperasi

Kegiatan :

- (1) Menyalurkan kredit program.
 - (2) Mengadakan pembinaan dan pelatihan pengelola koperasi dan UKM
 - (3) Memfasilitasi : (a) bantuan permodalan; (b) bantuan kemitraan; (c) pinjaman bank.
- b) Peningkatan peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan kredit

Kegiatan :

- (1) Melaksanakan penguatan bantuan/ penyertaan modal pada perbankan.
- (2) Mengefektifkan peran Bank Syariah / BMT.

5.6. Misi Keenam : Mewujudkan tata ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan :

1. Mengoptimalkan penataan ruang yang partisipatif di berbagai tingkatan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sasaran :

- a. Terwujudnya rencana tata ruang yang partisipatif, dengan prioritas bagi daerah yang strategis.

Kebijakan :

- 1) Penetapan dan penerapan rencana tata ruang.

Program :

- a) Penyediaan dokumen rencana tata ruang.

Kegiatan :

- Menyusun dokumen rencana tata ruang.

- b) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai kebijakan tata ruang di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan :

Melaksanakan diseminasi, sosialisasi, dan pelatihan tata ruang di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat.

- c) Peningkatan pelayanan dan pengawasan perijinan bagi semua unsur pelaku pembangunan.

Kegiatan :

Memberikan Pelayanan dan pengawasan fatwa rencana pengarahannya lokasi dan perijinan lainnya bagi semua unsur pelaku pembangunan.

- d) Verifikasi pembangunan perumahan

Kegiatan :

Melaksanakan penertiban penyerahan fasum dan fasos perumahan.

- b. Adanya kebijakan, peraturan, mekanisme perijinan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

Kebijakan :

Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang.

Program :

- a) Penyediaan Peralatan daerah mengenai tata ruang

Kegiatan :

Menyusun peraturan daerah dan peraturan lainnya mengenai rencana tata ruang.

- b) Pengendalian tata ruang

Kegiatan :

- (1) Memperdakan semua rencana tata ruang (RTR) yang ada.
- (2) Memberikan insentif dan disinsentif bagi yang mematuhi dan melanggar tata ruang.

- c. Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, permukiman perkotaan dan perdesaan.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang rencana tata ruang kepada aparat dan masyarakat

Program :

Sosialisasi konsepsi pengelolaan tata ruang dan Amdal bagi aparat dan masyarakat.

Kegiatan :

Meningkatkan kinerja tim koordinasi penataan ruang, daerah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan

Program :

a) Social forestry

Kegiatan :

PHBM/PMDH

b) Rehabilitasi lahan kritis

Kegiatan :

Melaksanakan Penghijauan

2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang memadai untuk memajukan perekonomian daerah.

Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah.

Kebijakan :

1) Meningkatkan aksesibilitas/kemudahan pergerakan kegiatan untuk membangkitkan investasi dan produksi agar tercipta keterkaitan ekonomi antar wilayah yang saling mendukung.

Program :

a) Pengembangan Transportasi, Irigasi, Perhubungan serta Prasarana dan sarana di sentra produksi dan antar wilayah.

Kegiatan :

(1) Melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan dan pembangunan.

(2) Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelistrikan.

(3) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terminal dan pengadaan PJU.

b) Penumbangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta sumberdaya air

Kegiatan :

- (1) Menata dan meningkatkan tugas dan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
- (2) Mengelola sumberdaya air dengan efisien dan efektif.
- (3) Meningkatkan konservasi, pemanfaatan, dan produktivitas sumber air.

- 2) Mengembangkan kualitas, kuantitas dan kapasitas terminal dan sub terminal.

Program :

Peningkatan terminal bertype dan pengembangan terminal agro atau collection centre.

Kegiatan :

Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan terminal, terminal bertype, dan terminal agro.

- 3) Mengembangkan fasilitas umum PJU.

Program :

Peningkatan pelayanan PJU.

Kegiatan :

Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan PJU.

- 4) Mengembangkan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

Program :

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Kegiatan :

Melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang tertib, aman, dan nyaman serta meningkatkan pelayanan prasarana dasar, dan utilitas umum

Sasaran :

Meningkatnya fungsi, peranan dan intensitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai kemampuan dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan :

- 1) Tersedianya fasilitas dan utilitas permukiman yang memadai.

Program :

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan fasilitas dan utilitas.

Kegiatan :

- (1) Menyusun data dasar untuk perencanaan fasilitas dan utilitas permukiman.
 - (2) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan pemeliharaan fasilitas dan sistem jaringan utilitas permukiman.
- 2) Meningkatkan pelatihan manajemen lingkungan permukiman bagi aparat dan masyarakat

Program :

Pengelolaan lingkungan permukiman.

Kegiatan :

- (1) Menyusun peraturan dan mekanisme penataan lingkungan permukiman.
 - (2) Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan mengenai lingkungan alam dan lingkungan binaan.
- 3) Meningkatkan kerjasama investasi dan manajemen antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan prasarana dan sarana permukiman.

Program :

Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana permukiman.

Kegiatan :

Memperbaiki dan menyediakan prasarana dan sarana permukiman.

4. Mengatur dan melaksanakan penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah

Sasaran :

Terwujudnya sistem penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan :

Meningkatkan dan mengembangkan penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Program :

Peningkatan penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan penegakan hukum pertanahan.

Kegiatan :

- (1) Menetapkan dan menegaskan subyek dan obyek redistribusi tanah kelebihan batas maksimum dan tanah absente.
- (2) Melaksanakan pemetaan/revisi penggunaan tanah.
- (3) Melaksanakan pemetaan penguasaan tanah.
- (4) Menyelesaikan masalah/kasus-kasus pertanahan.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah.
- (6) Memberikan ijin lokasi/penetapan lokasi.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tanpa mengabaikan daya dukung dan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

Sasaran :

Meningkatnya produktivitas SDA, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan/pencemaran lingkungan.

Kebijakan :

Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.

Program :

- a) Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Kegiatan :

- (1) Menyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah.
- (2) Melaksanakan inventarisasi sumberdaya hutan, tanah, dan air secara terpadu.
- (3) Melaksanakan pemetaan sumberdaya mineral.

- b) Penyelamatan hutan, tanah, dan air.

Kegiatan :

- (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai.
- (2) Melestarikan flora dan fauna.

- (3) Melaksanakan peningkatan dan pengendalian luas kawasan yang berfungsi hutan.
 - (4) Mengamankan dan melestarikan sumberdaya air.
 - (5) Merehabilitasi lahan kritis dan lahan tidur.
- c) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam
- Kegiatan :**
- (1) Menyusun strategi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.
 - (2) Memfasilitasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
- d) Pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup
- Kegiatan :**
- (1) Melaksanakan pengendalian usaha pertambangan dan penggunaan air tanah.
 - (2) Mengendalikan pencemaran udara.
 - (3) Mengendalikan pencemaran air.

VI. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN

6.1. Pendekatan Pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya

6.1.1. Pendekatan Transparansi Pembangunan dan Partisipasi Publik

Dasar pemikiran dari pendekatan transparansi pembangunan dan partisipasi publik adalah untuk menumbuhkan perasaan memiliki terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Perasaan memiliki akan ada pada masyarakat apabila masyarakat dapat memahami dan mempercayai maksud dan tujuan dari pelaksanaan suatu program pembangunan, mengerti dan mempercayai mengapa alokasi anggaran pemerintah berbeda untuk satu program terhadap program yang lainnya. Memahami skala prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah karena dijelaskan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mempercayai bahwa pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembangunan akan dikelola secara profesional dan amanah dalam menggunakan dana masyarakat. Dengan adanya pemahaman dan kepercayaan dari masyarakat diharapkan akan menimbulkan motivasi dikalangan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Upaya yang dilakukan agar diperoleh kepercayaan dari masyarakat, maka dalam dalam proses pembangunan dilaksanakan secara transparan. Transparansi ini menyangkut dua aspek : (1) System, (2) itikad (*good will*) dari Pemerintah Daerah :

- (1) System, menyangkut peraturan dan mekanisme perundang-undangan kebebasan informasi;
- (2) Itikad (*good will*) dari Pemerintah Daerah, menyangkut integritas pejabat publik dari pemerintah daerah.

Sedangkan partisipasi publik yang diharapkan terwujud, yaitu :

- (1) Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam program pembangunan;
- (2) Pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam program pembangunan;
- (3) Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dituangkan dalam pemeliharaan dan pengawasan publik terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

6.1.2. Pendekatan Proses

Pendekatan proses maksudnya pembangunan yang dilaksanakan melalui proses tahapan yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan proses dimaksudkan bahwa proses pembangunan harus memiliki akuntabilitas publik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar dapat dilakukan deteksi dini dari indikasi penyimpangan proses pembangunan sehingga arah pembangunan,. dapat tetap dalam koridor yang benar dan akan terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.

6.1.3. Pendekatan Hasil

Pendekatan hasil, maksudnya hasil pembangunan harus sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik output, outcome, benefit, maupun goals yang ingin dicapai, sehingga target-target capaian tahunan dapat dicapai.

Pendekatan hasil diarahkan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, agar tetap dalam alur untuk mencapai tujuan jangka menengah.

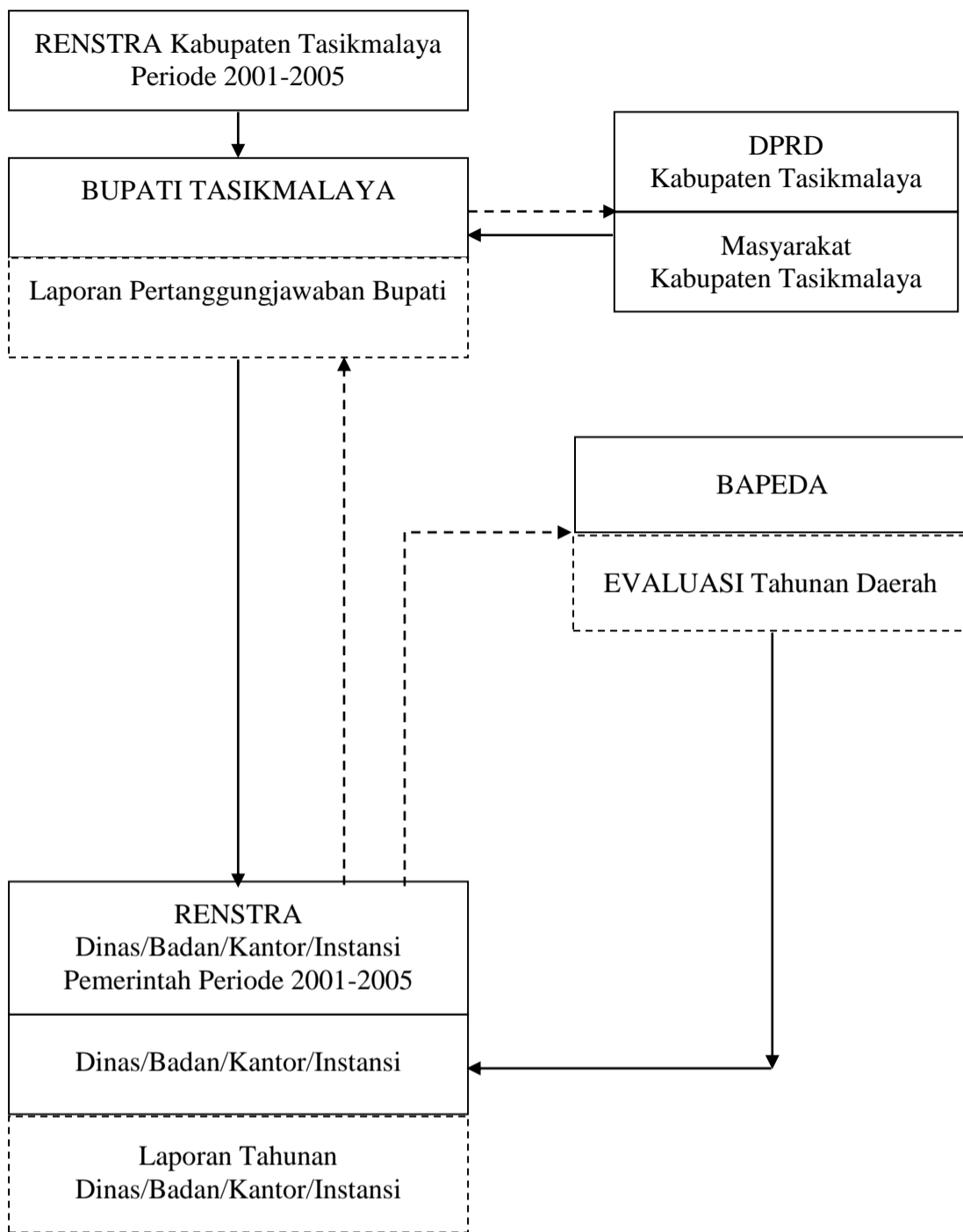
6.2. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Renstra

Agar Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Renstra kabupaten tersebut harus ditindaklanjuti oleh seluruh komponen daerah, terutama komponen struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Dinas/Badan/Kantor/Instansi pemerintah daerah. Dinas/Badan/Kantor/Instansi pemerintah daerah tersebut menindaklanjuti Renstra Kabupaten Tasikmalaya dengan menyusun Rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor/Instansi pemerintah yang mengacu pada Renstra kabupaten. Selain itu agar masyarakat dan seluruh stakeholders dapat memahami untuk kemudian mendukung kebijakan-kebijakan dalam Renstra kabupaten, perlu dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat baik instansi pemerintah, legislatif, maupun komponen masyarakat.

Renstra Dinas/Badan/Kantor/Instansi pemerintah yang akan disusun berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Laporan Tahunan Dinas/Badan/Kantor/Instansi Pemerintah yang diserahkan ke Sekretariat Daerah, dan ke Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) untuk dilakukan evaluasi tahunan pelaksanaan pembangunan

tahun yang bersangkutan. Laporan tersebut diserahkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan atau paling lambat sampai dengan akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya Bappeda sebagai lembaga perencana yang mempunyai kewenangan memonitor dan mengevaluasi kegiatan daerah, menyusun evaluasi tahunan pemerintah daerah berdasarkan laporan dari Dinas/Badan/Kantor/Instansi Pemerintah selambat-lambatnya pertengahan Pebruari tahun berikutnya. Berdasarkan evaluasi tahunan pemerintah daerah ditambah dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat / pihak swasta disusun Laporan Pertanggungjawaban Bupati sebagai pengembalian amanat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, selambat-lambatnya pertengahan Maret tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban Bupati disusun oleh Sekretariat Daerah.

Secara garis besar, mekanisme pelaksanaan renstra dan system pelaporan dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

—————> : Garis Pelaksanaan

- - - - -> : Garis Laporan dan Pertanggungjawaban

Gambar 6.1. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Renstra

6.3. Pengendalian Program dan Koordinasi

6.3.1. Pengendalian Program

Bupati dengan dibantu oleh Wakil Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Bupati melaksanakan tugas :

- a. Memberikan petunjuk dan pengarahan pada seluruh unit satuan kerja untuk keterpaduan program-program demi keberhasilan pelaksanaan program.
- b. Menerima laporan pelaksanaan program dan mengambil langkah-langkah tindakan serta keputusan guna menjamin keberhasilan pelaksanaan program.

Para kepala unit satuan kerja bertanggungjawab mengendalikan program-program kegiatan dilingkup unitnya yang telah dituangkan dalam Renstra unit satuan kerja, dan bertanggungjawab atas keberhasilan program-program yang dilaksanakan.

6.3.2. Koordinasi

Sekretaris Daerah bertindak selaku ketua pelaksana program dibantu oleh Kepala Bapeda selaku wakil ketua pelaksana program, berkewajiban untuk :

- a. Mengkoordinasikan seluruh unit satuan kerja, masyarakat/swasta guna mendukung keterpaduan dan keberhasilan program.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan sebagai penjabaran kegiatan strategis terutama kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan strategis.
- c. Memberikan petunjuk dan pengarahan demi keterpaduan dan keberhasilan pelaksanaan program strategis.
- d. Menggerakkan partisipasi masyarakat serta dapat menghimpun potensi swasta didalam mensukseskan pelaksanaan Renstra.

Sedangkan para asisten daerah (Asisten Tata Praja, Asisten Administrasi, dan Asisten Administrasi Pembangunan) dalam pelaksanaan tugasnya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Bagian-Bagian dibawahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dalam pelaksanaan Renstra Kabupaten :

- a. Asisten Tata Praja mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Misi 1, 2, dan Misi 3;
- b. Asisten Administrasi mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Misi 4 dan Misi 5;
- c. Asisten Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Misi 6.

Koordinasi pada tingkat kecamatan dilakukan sebagai berikut :

- a. Para camat mengkoordinasikan semua kegiatan agenda strategis pada lingkup kecamatannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun oleh masyarakat.
- b. Didalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan strategis di wilayahnya, camat berkewajiban untuk :
 - Memasyarakatkan Renstra Kabupaten Tasikmalaya kepada seluruh aparat dan segenap masyarakatnya.
 - Mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat / swasta di dalam mensukseskan pelaksanaan Renstra kabupaten.

6.4. Sumber-Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan Renstra Kabupaten berasal dari APBD Kabupaten maupun Non APBD Kabupaten serta investasi masyarakat/swasta. Besar kecilnya penyediaan biaya kegiatan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pada tiga hal pokok, yaitu : (1) Ketersediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan kewenangan yang diberikan, (2) Kebutuhan pembiayaan berdasarkan kewenangan yang diserahkan, (3) Kemampuan pemerintah daerah dalam menarik dana dari swasta maupun bantuan dari propinsi atau pemerintah pusat.

6.5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan agar konsisten mengacu pada dan dalam rangka pencapaian hasil yang telah ditetapkan pada Renstra.

- a. Pemimpin Pelaksana Kegiatan memimpin serta bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dipimpinnya.
- b. Penanggungjawab dan Pembina Pelaksana Kegiatan, memonitor dan mengevaluasi serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Penanggungjawab dan Pembina Kegiatan, memonitor dan mengevaluasi serta bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

- d. Kepala Bapeda melalui unit kerjanya, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terutama yang menggunakan dana APBD Kabupaten Tasikmalaya untuk menjaga tercapainya outcome dan sasaran fungsional kegiatan.
- e. Kepala Bawasda melalui unit kerjanya, melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terutama yang menggunakan dana APBD Kabupaten Tasikmalaya untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Hasil monitoring, dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kebijakan-kebijakan Bupati.
- g. Evaluasi Tahunan Daerah disusun berdasarkan hasil monitoring dan laporan tahunan dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya.

VII. PENUTUP

Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang mengatur gerak langkah kegiatan-kegiatan daerah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun dilaksanakan oleh masyarakat pihak swasta dengan dorongan dari pemerintah daerah.

Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya memuat 3 hal pokok yaitu : (1) Visi sebagai cita-cita daerah yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu; (2) Misi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, lengkap dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing misi; dan (3) Cara-cara untuk mencapai tujuan melalui strategi kebijakan, program, dan kegiatan, dimana didalamnya mengakomodir 21 bidang kewenangan daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya didalam pelaksanaannya merupakan acuan kerja bagi seluruh institusi pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya, yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi dengan menyusun Rencana Strategis masing-masing institusi pemerintah, dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

Setiap akhir tahun anggaran, institusi pemerintah daerah yang terdiri Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan menyusun laporan evaluasi tahunan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas/Badan/Kantor tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk selanjutnya disusun Evaluasi Tahunan Daerah yang akan menjadi bahan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada dasarnya adalah pertanggungjawaban Bupati sebagai institusi yang membawahi institusi pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga setiap institusi pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

REVISI INDIKATOR MAKRO
RENSTRA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001-2005

NO	INDIKATOR MAKRO	2001	2002	2003	2004	2005
1	Indeks Pembangunan Manusia	58.73	61.83	66.41	67.95	69.52
2	Jumlah Penduduk	1.565.906	1.587.078	1.607.792	1.628.694	1.649.867
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,30	1,35	1,31	1,30	1,30
4	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>)	466.360 (29,78 %)	420.574	424.591	427.805	432.199
	<i>Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)</i>	29,78	26,50	26,41	26,27	26,20
5	PDRB (atas dasar harga berlaku) (Rp. Trilyun)	3,99	4,32	4,62	5,13	5,70
6	Laju Inflasi ; Indeks Harga Konsumen (%)	16,71	10,29	10 -11 %	9-10 %	8-9 %
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 1993) (%)	2,95	3,10	3,25	3,75	4,00
8	PDRB per kapita (berlaku) (Rp.)	2.679.284	2.853.939	2.896.271	3.173.303	3.476.837
9	Investasi atas dasar harga berlaku (Rp. Trilyun)	1,33	1,93	2,08	2,26	2,51
10	Laju Investasi atas dasar harga konstan 1993 (%)	-	10,05%	8,02%	8,29%	11,00%
11	Konsumsi Pemerintah (G) (<i>berlaku</i>) (Rp. Milyar)	-	517,97	554,69	615,70	683,43
12	Jumlah penduduk yang bekerja	590.177	711.811	734.945	762.505	793.006
13	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	37,69	46,35	45,71	46,82	48,06
14	Jumlah Pengangguran Terbuka	35.578	34.881	33.747	32.482	31.183

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.